



BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM TAHUN 2025



**REFORMASI
HUKUM**



Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

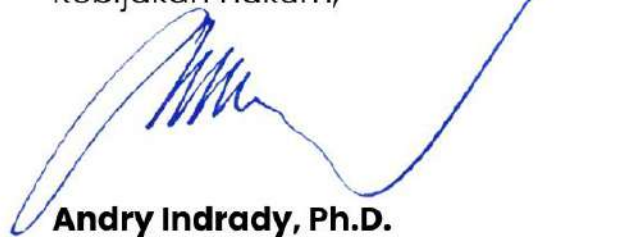
Sebagai unit yang berperan sebagai *think tank*, BSK Hukum diharapkan menjadi *supporting unit* Kementerian Hukum dalam melaksanakan perumusan kebijakan di bidang hukum berbasis *evidence-based policy*. LKjIP ini merupakan wujud komitmen dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dan akuntabel selama tahun 2025.

Apresiasi yang besar kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya LKjIP BSK Hukum Tahun 2025 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholder* yang senantiasa berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada BSK Hukum. Mari bersama terus kita tingkatkan kerja sama ini untuk bersama membangun bangsa dan negara.

Akhir kata, semoga LKjIP BSK Hukum Tahun 2025 yang masih jauh dari sempurna ini dapat menjadi alat evaluasi kinerja dan dapat memberikan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong BSK Hukum menjadi institusi yang lebih baik.

Jakarta, 15 Januari 2026

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Hukum,



Andry Indrady, Ph.D.



Ringkasa Eksekutif

BSK Hukum sebagai unsur pendukung Kementerian Hukum memiliki Sasaran Strategis (SS) "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi nasional". Pada tahun 2025, BSK Hukum memiliki Sasaran Program (1) "Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum" dan (2) "Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum". Pengukuran tingkat capaian kinerja BSK Hukum Tahun 2025 untuk Sasaran Program (1) dilakukan dengan **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)** yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara. Sedangkan untuk Sasaran Program (2) dilakukan dengan menggunakan **Indeks Reformasi Birokrasi (RB)** Kementerian yang dibina oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran Program (1) "Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum" yang dilakukan dengan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum telah berhasil mencapai target dengan realisasi nilai sebesar **92,54 (kategori: UNGGUL)**. Sedangkan untuk Sasaran Program (2) "Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum" yang dilakukan pengukuran dengan menggunakan nilai RB dari KemenPAN-RB, masih harus menunggu finalisasi nilai.

Namun demikian, sebagai progres capaian sementara untuk Sasaran Program (2) dapat dilaporkan bahwa capaian Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) adalah sebesar **100% untuk pengisian RKT RB** unit BSK Hukum pada aplikasi e-RB.

BSK Hukum juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai supporting unit dalam hal perumusan kebijakan di bidang hukum dengan melaksanakan analisis strategi kebijakan. Hasil analisis yang dilakukan oleh BSK Hukum menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan salah satunya berupa Peraturan Menteri Hukum. Sepanjang tahun 2025, BSK Hukum telah melaksanakan **6 kegiatan mandatori** dan **94 analisis kebijakan**. Capaian pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan BSK Hukum pada tahun 2025 mencapai 100% ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii

01

PENDAHULUAN

Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
Maksud dan Tujuan	7
Aspek Strategis	7
Isu Strategis	8
Sistematika Laporan	9

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis	12
Perjanjian Kinerja	21
Manajemen Risiko	27

02

03

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi	32
Realisasi Anggaran	50
Capaian Kinerja Anggaran	51
Capaian Kinerja Lainnya	53
Manajemen Risiko	57

PENUTUP

Kesimpulan	67
Saran	67
Monitoring Rekomendasi Perbaikan Kinerja	68

04

Daftar Gambar & Tabel

Gambar 1 – Struktur Organisasi Badan Strategi Kebijakan Hukum	3
Gambar 2 - Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Eselon II	6
Gambar 3 - JF di lingkungan BSK Hukum.....	7
Gambar 4 – Asta Cita.....	12
Gambar 5 - Delapan Prioritas Nasional	13
Gambar 6 - Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Hukum	15
Gambar 7 - Visi, Misi, dan Tujuan BSK Hukum	18
Gambar 8 - Pohon Kinerja Kementerian Hukum	20
Gambar 9 - Perjanjian Kinerja Kepala BSK Hukum Tahun 2025	22
Gambar 10 – Capaian Kinerja pada e-Performance	53
Gambar 11 – Capaian Kinerja pada aplikasi e-Monev Bappenas Level Komponen	55
Gambar 12 - Capaian Kinerja pada aplikasi e-Monev Bappenas Level Rincian Output	56

Tabel 1 - Jumlah Pegawai per Jabatan	6
Tabel 2 - Proses Manajemen Risiko di BSK Hukum	28
Tabel 3 – Pagu dan Realisasi Anggaran BSK Hukum Tahun 2025.....	50
Tabel 4 - Realisasi Anggaran Per Kegiatan pada BSK Hukum Tahun 2025.....	50
Tabel 5 - Nilai IKPA BSK Hukum sebagai Unit Eselon I	52
Tabel 6 - Nilai IKPA BSK Hukum sebagai Satker	52
Tabel 7 - Hasil Pemantauan dan Reviu atas Risiko Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025	59

L POLICY HUB



Bab I

PENDAHULUAN

LKjIP BSK HUKUM 2025

A. LATAR BELAKANG

Pada siklus manajemen, pelaksanaan evaluasi merupakan unsur penting yang memberi *input* balik bagi perencanaan, karena evaluasi dapat menilai kinerja sebuah organisasi dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diharapkan arah program dan kebijakan yang dituangkan ke dalam kegiatan akan mampu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan dari pemangku kepentingan/*stakeholder*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan wujud transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja. Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014, bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi.

LKjIP BSK Hukum ini menyajikan perencanaan dan capaian serta analisis pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang, bersih, akuntabel, berdaya guna, dan berhasil guna dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kinerja BSK Hukum diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BSK Hukum Tahun 2025. LKjIP ini diharapkan mampu menyimpulkan secara utuh kendala yang dihadapi dan mendeskripsikan keberhasilan dalam pencapaian kinerja serta menjadi bahan evaluasi perbaikan bagi perencanaan kinerja yang berkualitas pada tahun berikutnya.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum yang diundangkan pada tanggal 5 November 2024, BSK Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Peraturan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. Berdasarkan Permenkum tersebut, telah dilakukan penyesuaian nomenklatur, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi pada BSK Hukum.

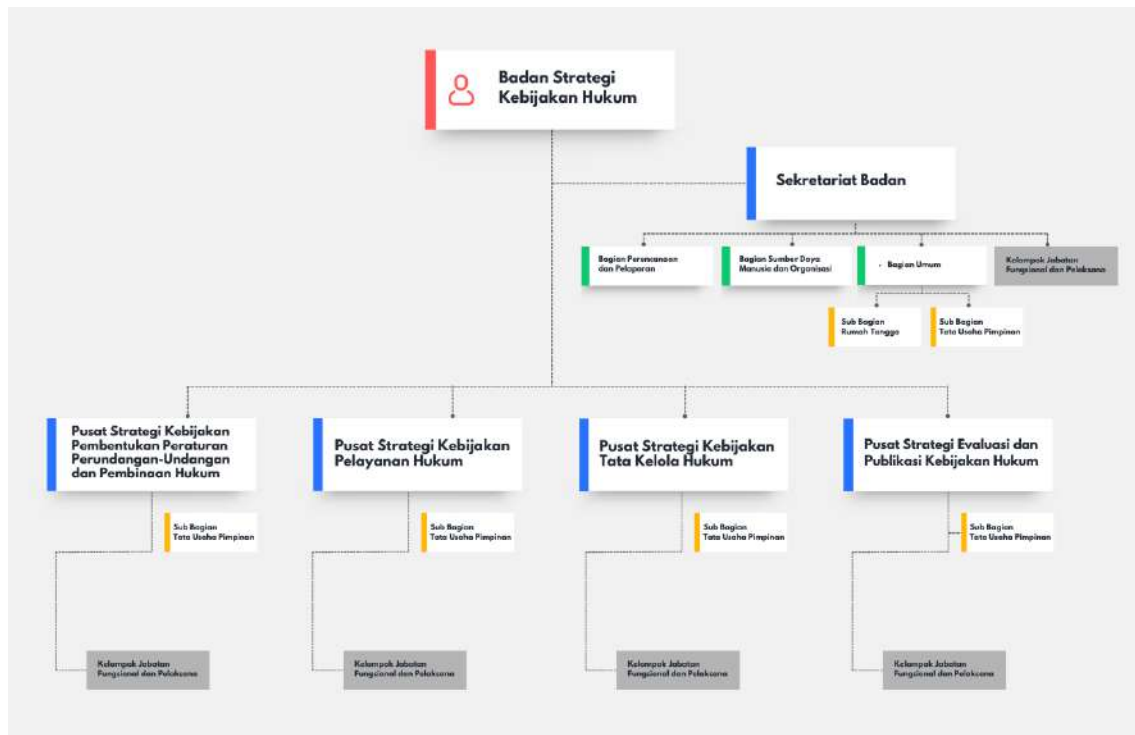
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BSK Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
- c. koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum;

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BSK Hukum didukung oleh 1 (satu) eselon II pendukung/fasilitatif dan 4 (empat) eselon II pelaksana teknis.

Gambar 1 – Struktur Organisasi Badan Strategi Kebijakan Hukum



1. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) koordinasi dan fasilitasi kerja sama, pembentukan regulasi dan kebijakan;
- c) koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, dan manajemen risiko;
- d) koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
- e) koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara;
- f) koordinasi dan pengelolaan urusan sumber daya manusia;
- g) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan perlindungan hukum pegawai;
- h) koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
- i) pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi;
- j) pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

2. Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan dan Pembinaan Hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran analisis kebijakan di bidang pembentukan dan Pembinaan hukum;
- b) pelaksanaan analisis kebijakan dalam penyusunan agenda, formulasi, implementasi dan perumusan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan hukum;
- c) penyampaian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan hukum;
- d) pelaksanaan advokasi atas rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan Hukum;
- e) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan hukum;
- f) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan hukum;
- g) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan hukum; dan
- h) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Hukum.

3. Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang layanan administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran analisis kebijakan di bidang layanan administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual;
- b) pelaksanaan analisis kebijakan dalam penyusunan agenda, formulasi, implementasi dan perumusan rekomendasi strategi kebijakan di bidang layanan
- c) administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual;
- d) penyampaian rekomendasi strategi kebijakan di bidang layanan administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual;
- e) pelaksanaan advokasi atas rekomendasi strategi kebijakan di bidang layanan administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual;
- f) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan analisis kebijakan di bidang layanan administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual;
- g) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang layanan administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual;

- h) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan di bidang layanan administrasi hukum umum, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual;
- i) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum.

4. Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran analisis kebijakan di bidang tata kelola organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b) pelaksanaan analisis kebijakan dalam penyusunan agenda, formulasi, implementasi dan perumusan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c) penyampaian rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d) pelaksanaan advokasi atas rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan analisis kebijakan di bidang tata kelola organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia;
- f) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang tata kelola organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia;
- g) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola organisasi, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- h) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum.

5. Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis evaluasi kebijakan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan, serta publikasi hasil analisis kebijakan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran analisis evaluasi kebijakan dan publikasi hasil analisis kebijakan hukum;
- b) pelaksanaan analisis evaluasi kebijakan dan perumusan rekomendasi strategi kebijakan serta publikasi hasil analisis kebijakan hukum;
- c) penyampaian rekomendasi strategi kebijakan hukum;
- d) pelaksanaan advokasi atas rekomendasi strategi evaluasi kebijakan hukum;
- e) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan analisis evaluasi kebijakan dan publikasi hasil analisis kebijakan hukum;

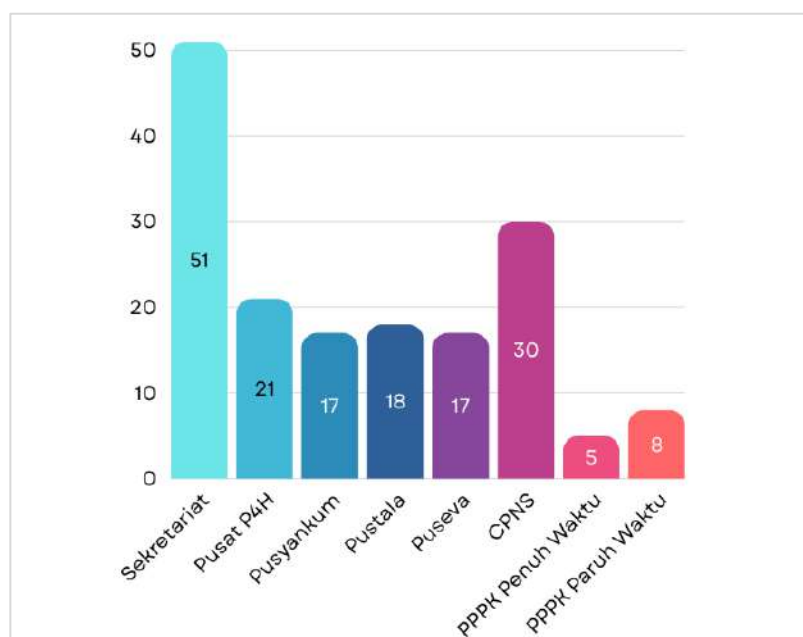
- f) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi evaluasi kebijakan hukum;
- g) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum;
- h) promosi dan diseminasi hasil publikasi kebijakan hukum; dan
- i) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum.

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BSK Hukum didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, S1, S2, dan S3 yang meliputi pejabat struktural, 10 jenis fungsional tertentu (Analisis Kebijakan, Analisis Hukum, Analisis Anggaran, Perencana, Arsiparis, Pranata Komputer, Analisis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Analisis SDM Aparatur, dan Penata Penerbitan Ilmiah), serta Fungsional Umum. Total SDM yang dimiliki oleh BSK Hukum sampai dengan akhir tahun 2025 adalah **168 pegawai**.

Tabel 1 - Jumlah Pegawai per Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eselon I.A (Pimti Madya)	1
2	Pejabat Eselon II.A (Pimti Pratama)	5
3	Pejabat Eselon III.A (Administrator)	3
4	Pejabat Eselon IV.A (Pengawas)	6
5	Pejabat Fungsional	92
6	PNS Pelaksana (JFU)	18
7	CPNS	30
8	PPPK Penuh Waktu Pejabat Fungsional	1
9	PPPK Penuh Waktu	4
10	PPPK Paruh Waktu	8
TOTAL		168

Gambar 2 - Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Eselon II



Gambar 3 - JF di lingkungan BSK Hukum



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi pemerintah menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka BSK Hukum berkomitmen untuk bersikap profesional dan akuntabel terhadap setiap informasi tentang program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian LKjIP BSK Hukum Tahun 2025 merupakan salah satu komitmen pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam BSK Hukum yang bersih, berwibawa, *legitimate*, dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian LKjIP BSK Hukum Tahun 2025 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada semua *stakeholder* tentang capaian kinerja BSK Hukum yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan, serta upaya penanggulangan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2025;
2. Mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategi dan rencana kinerja sasaran dan program/kegiatan yang mencerminkan tugas pokok BSK Hukum tahun 2025;
3. Mengetahui masalah ataupun hambatan yang dihadapi BSK Hukum atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta analisis penanggulangannya selama tahun 2025;
4. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BSK Hukum;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BSK Hukum.

D. ASPEK STRATEGIS

Kementerian Hukum memiliki salah satu tanggung jawab dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui pembentukan kebijakan publik yang tepat, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan pembentukan kebijakan publik

sebagaimana dimaksud, diperlukan tata kelola kebijakan melalui pendekatan yang terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BSK Hukum sebagai Unit Kerja Eselon I berperan sebagai dukungan manajemen (*supporting unit*) Kementerian Hukum dalam hal perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Hal ini menjadikan BSK Hukum sebagai *think tank* Kementerian Hukum dari sisi proses, menjelaskan relasi antara pembentukan kebijakan dengan pengelolaan pengetahuan dan menyusun proses bisnis perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Peran ini menempatkan BSK Hukum pada posisi sentral dalam memastikan bahwa setiap regulasi dan kebijakan hukum yang lahir didasarkan pada analisis yang tajam, data yang valid, dan proyeksi dampak yang terukur.

Cakupan strategis BSK Hukum terletak pada kemampuannya dalam melakukan **siklus analisis kebijakan yang utuh**—dari pemetaan isu aktual hingga evaluasi pasca-implementasi kebijakan. Dengan fokus pada kualitas rekomendasi, BSK Hukum berfungsi sebagai instrumen penjamin mutu (*quality assurance*) yang memastikan bahwa rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan sesaat, namun juga antisipatif terhadap dinamika sosial-politik dan perkembangan teknologi di masa depan.

Kapasitas SDM dan pola kerja kolaboratif menjadi fondasi strategis dalam pencapaian target organisasi. Keterlibatan berbagai jabatan fungsional seperti Analis Kebijakan, Analis Hukum, Analis SDM Aparatur, Perencana, dan Pelaksana dalam satu ekosistem kerja menciptakan sinergi multidisiplin yang memperkuat kedalaman analisis. Lebih lanjut, integrasi teknologi informasi dan pemanfaatan data analitik merupakan aspek strategis yang krusial. Hal ini memungkinkan BSK Hukum untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) secara lebih akurat dan responsif, sekaligus memperkuat reputasi organisasi sebagai institusi yang kredibel dan profesional dalam tata kelola pemerintahan yang modern.

E. ISU STRATEGIS

Sebagai *supporting unit*, BSK Hukum berperan untuk mengkoordinasikan, merumuskan, dan merekomendasikan kebijakan di bidang hukum di mana dalam kondisi eksisting saat ini masih terdapat permasalahan atau tantangan pada berbagai kebijakan atau keputusan di lingkungan Kementerian Hukum. Analisis potensi dan permasalahan dilakukan untuk mengidentifikasi isu atau kondisi strategis BSK Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang berdampak dalam jangka panjang dan dapat mempengaruhi arah atau keputusan organisasi ke depannya. Berikut beberapa isu strategis tersebut:

1. Telah disusun Peraturan Menteri Hukum Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum serta Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Analisis Kebijakan di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum yang ditetapkan melalui SK Kepala BSK Hukum Nomor PPH-34.OT.03.01 Tahun 2025. Namun keduanya belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada para Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan pengetahuan tentang metode kebijakan yang baku yang dapat menjadi acuan dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan sehingga menyebabkan variasi kualitas hasil kajian antar-unit.

2. Capaian kinerja pemanfaatan hasil analisis kebijakan telah terealisasi sepenuhnya (100%). Namun optimalisasi pengukuran manfaat dari rekomendasi kebijakan masih terus dikembangkan, mengingat dampak dari analisis kebijakan bersifat **jangka panjang** dan tidak selalu dapat dikuantifikasi secara cepat pada periode pelaporan yang sama dengan tahun anggaran kajian tersebut dijalankan. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kewenangan BSK Hukum, sistem pengambilan kebijakan penerima manfaat, dan sebagainya.
3. Kapasitas SDM tidak proporsional dengan beban kerja, banyak pegawai yang merangkap lebih dari satu tim kajian. Meskipun kolaborasi dengan Analis Hukum dan Pelaksana cukup membantu, namun kondisi ini berpotensi menurunkan kedalaman analisis dan meningkatkan risiko kelelahan kerja. Keterbatasan formasi membatasi kemampuan organisasi untuk mengambil topik kajian strategis tambahan yang penting guna pengembangan kebijakan hukum nasional.
4. Keterbatasan integrasi data dan sistem informasi kebijakan. Belum adanya sistem manajemen pengetahuan yang terpadu menyebabkan data kebijakan tersebar di berbagai unit tanpa adanya mekanisme integrasi yang efektif. Kondisi ini menghambat akses terhadap data historis, menimbulkan duplikasi pengumpulan data, dan mempersulit pengembangan basis pengetahuan organisasi yang komprehensif. Koordinasi antar-unit dalam analisis kebijakan yang melibatkan beberapa Pusat menjadi kurang optimal karena keterbatasan berbagi informasi secara *realtime*.
5. Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal. Sistem pengelolaan analisis kebijakan (Legal Policy Hub) telah dikembangkan, namun sosialisasi dan implementasinya belum komprehensif. Ketergantungan pada proses yang manual mengurangi efisiensi pengelolaan kegiatan analisis kebijakan dan membatasi kemampuan analitik berbasis data besar yang seharusnya menjadi keunggulan *think tank* modern.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	: Berisi pandangan umum atau gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
RINGKASAN EKSEKUTIF	: Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat (a) latar belakang, (b) tugas, fungsi dan struktur organisasi, (c) maksud dan tujuan, (d) aspek strategis, (e) isu strategis, dan (f) sistematika laporan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan (a) Rencana Strategis yang berisi rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan (b) Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan

a) Capaian kinerja: analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja, juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

b) Realisasi Anggaran: menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

Menjelaskan (a) kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja organisasi, dan (b) saran, upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja organisasi.



Bab II

PERENCANAAN KINERJA

LKjIP BSK HUKUM 2025

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Hukum

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian atau Lembaga pada akhir periode perencanaan. Visi mencerminkan kondisi ideal yang menjadi arah dan cita-cita organisasi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sebagai ukuran keberhasilan tertinggi, visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*), yaitu perubahan atau manfaat yang diharapkan terjadi di masyarakat sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan strategis, program, dan kegiatan Kementerian. Dengan demikian, visi berfungsi sebagai panduan utama dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Melalui visi, organisasi memiliki gambaran menyeluruh tentang *positioning*, kontribusi, dan orientasi strategisnya dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2025–2029 adalah **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Gambar 4 – Asta Cita



RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

Gambar 5 - Delapan Prioritas Nasional



Dalam rangka mendukung Visi Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yaitu **"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."**

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama: (1) Reformasi Hukum, (2) Pembangunan Hukum, (3) Penegakan Hukum, dan (4) Pelayanan Hukum. Berdasarkan arah pembangunan nasional tersebut, Kementerian Hukum menetapkan visi sebagai berikut:

Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju **Indonesia Emas** Tahun 2045

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029.

Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Supremasi hukum** bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
 - Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat
 - Kesetaraan di hadapan hukum
 - Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
 - Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
 - Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
 - Kepastian hukum
 - Sistem peradilan yang independen dari berbagai intervensi kekuasaan
- b. **Stabilitas** keamanan bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
- c. **Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
 - Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
 - Kepercayaan investor
 - Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
- d. **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan misi Kementerian sebagai penjabaran arah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi. Merujuk pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum, misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan

hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

2) Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1) Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum

2) Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Gambar 6 - Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Hukum



2. Visi Badan Strategi Kebijakan Hukum

Visi BSK Hukum merupakan penjabaran visi Kementerian Hukum yang menggambarkan kondisi ideal organisasi di masa depan, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perpres 80/2025. Visi ini menjadi arah dan semangat bersama bagi seluruh jajaran BSK Hukum dalam melaksanakan tugas perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Sebagai UKE I I, visi BSK Hukum bersifat menurunkan dan memperkuat visi Kementerian Hukum dalam konteks

pengembangan kebijakan hukum nasional. Berdasarkan visi Kementerian yang telah dipaparkan, BSK Hukum menetapkan visi jangka menengah organisasi, yaitu:



Secara umum, Visi ini mengandung makna bahwa BSK Kementerian Hukum bertujuan menjadi institusi unggulan dan rujukan nasional dalam menghasilkan kebijakan hukum yang ilmiah, terukur, responsif, dan berkualitas melalui pendekatan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Visi ini mengandung beberapa kata kunci yang menggambarkan peran, ruang lingkup, dan kontribusi strategis BSK Hukum dalam mendukung tercapainya visi Kementerian Hukum. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kata kunci tersebut:

a. Unggulan strategi kebijakan hukum nasional

Kata kunci ini bermakna bahwa BSK Hukum menunjukkan aspirasi untuk menjadi institusi terdepan dan rujukan utama dalam bidangnya, bukan sekadar pelengkap atau pendukung. Ke depan, BSK diharapkan dapat menjadi *policy research center* yang menjadi rujukan nasional di bidang hukum.

b. Menghasilkan kebijakan hukum berbasis bukti

Kata kunci ini bermakna bahwa 3 hal penting, yaitu: (1) Kebijakan hukum harus didasarkan pada data, riset, dan bukti empiris, (2) Menghindari pembuatan kebijakan yang hanya berdasarkan asumsi atau kepentingan semata, dan (3) Pendekatan ilmiah dan terukur dalam penyusunan kebijakan hukum.

c. Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045

Kata kunci ini merupakan Visi Kementerian Hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 tahun 2025. Makna dari Visi Kementerian Hukum telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

3. Misi Badan Strategi Kebijakan Hukum

Misi BSK Hukum merupakan penjabaran dari visi organisasi yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Berdasarkan Lampiran I Perpres 80/2025, misi harus memuat upaya yang terarah dan terukur serta menjelaskan peran organisasi dalam mendukung pelaksanaan visi Kementerian. Misi BSK Hukum berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh unit kerja di dalamnya untuk memastikan keselarasan antara kegiatan analisis, perumusan, dan rekomendasi kebijakan dengan tujuan Kementerian. Dengan misi yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh sumber daya diarahkan untuk menghasilkan kebijakan hukum yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Misi BSK Hukum periode Renstra 205-2029 adalah:

a. Misi 1: Merumuskan dan memastikan manfaat rekomendasi kebijakan hukum berbasis bukti

Misi ini mendukung Misi 2 Kementerian Hukum, yaitu melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverance*). Dalam hal ini peran BSK Hukum difokuskan pada perumusan rekomendasi hukum berbasis bukti, sehingga kebijakan yang disusun memiliki dasar kajian yang kuat, berbasis data, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. BSK Hukum juga memastikan rekomendasi kebijakan yang diberikan dapat dimanfaatkan sehingga dapat terlihat dampak signifikan terhadap kualitas kebijakan hukum nasional. Dengan demikian, setiap rekomendasi strategi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada substansi hukum, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan untuk mendukung tata kelola birokrasi di bidang hukum nasional.

b. Misi 2: Optimasi pelaksanaan tata kelola birokrasi BSK Hukum yang transparan, akuntabel dan profesional

Misi ini menekankan pada optimasi tata kelola birokrasi BSK Hukum dalam mendukung terwujudnya cita-cita reformasi birokrasi Kementerian Hukum. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi BSK Hukum yang transparan, akuntabel dan profesional.

4. Tujuan Badan Strategi Kebijakan Hukum

Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi Kementerian. Berdasarkan visi, misi BSK Hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan BSK Hukum untuk periode Renstra 2025-2029 adalah:

a. Tujuan 1: Meningkatnya kualitas kebijakan hukum Kementerian Hukum, dengan Indikator Tujuan 1.1 (IT 1.1): Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Hukum

Tujuan ini menegaskan fokus BSK Hukum dalam memperkuat proses analisis, perumusan, dan rekomendasi strategi kebijakan hukum yang sistematis dan terukur. Kebijakan yang berkualitas menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang hukum. Sehingga, Indikator ini Mengukur efektivitas dan koherensi kebijakan hukum yang dihasilkan BSK Hukum dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Tujuan 2: Terwujudnya Kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, dengan Indikator Tujuan 2.1 (IT2.1): persentase kemanfaatan rekomendasi kebijakan hukum

Tujuan ini menekankan pentingnya memastikan setiap rekomendasi kebijakan hukum yang dihasilkan BSK Hukum memiliki nilai manfaat yang nyata bagi Kementerian Hukum dan para pemangku kepentingan. Kemanfaatan tersebut tercermin dari sejauh mana rekomendasi digunakan sebagai dasar perbaikan regulasi, penyempurnaan tata kelola, atau pengambilan keputusan strategis di bidang hukum. Indikator ini mengukur tingkat adopsi dan relevansi rekomendasi, sehingga BSK Hukum dapat menilai efektivitas kontribusinya

dalam proses pembentukan kebijakan. Selain itu, indikator ini memastikan bahwa rekomendasi tidak hanya selesai pada tahap penyusunan, tetapi benar-benar memberikan dampak yang terukur dalam mendukung kinerja Kementerian Hukum serta agenda Reformasi Birokrasi.

c. **Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola birokrasi BSK Hukum yang transparan, akuntabel dan profesional, dengan Indikator Tujuan 3.1 (IT 3.1): Indeks tata kelola birokrasi BSK Hukum**

Indikator ini mengukur kematangan tata kelola birokrasi BSK Hukum, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran, peningkatan kualitas layanan internal hingga memastikan tindak lanjut temuan auditor eksternal atas laporan keuangan BSK Hukum. Selain itu, indikator ini juga mempertegas komitmen BSK Hukum dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Tujuan 1 dan Tujuan 2 BSK Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan Kementerian Hukum mengenai meningkatnya pembangunan hukum. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas kebijakan hukum dan penyediaan rekomendasi yang disusun secara *evidence-based*, sehingga arah pembangunan hukum lebih terukur dan sesuai kewenangan Kementerian Hukum. Pendekatan berbasis bukti ini memperkuat akurasi dan relevansi rekomendasi, serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Hukum sebagai indikator tujuan kementerian.

Tujuan 3 BSK Hukum memberikan dukungan langsung terhadap pencapaian tujuan Kementerian Hukum terkait meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BSK Hukum yang berfokus pada perbaikan proses kerja, penguatan tata kelola, dan peningkatan akuntabilitas internal. Pelaksanaan RB pada unit ini secara otomatis memberikan kontribusi terhadap penilaian RB Kementerian secara keseluruhan, karena hasil evaluasi nasional merupakan gabungan kinerja seluruh unit kerja. Dengan demikian, keberhasilan BSK Hukum dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi berperan penting dalam mendorong peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Gambar 7 - Visi, Misi, dan Tujuan BSK Hukum

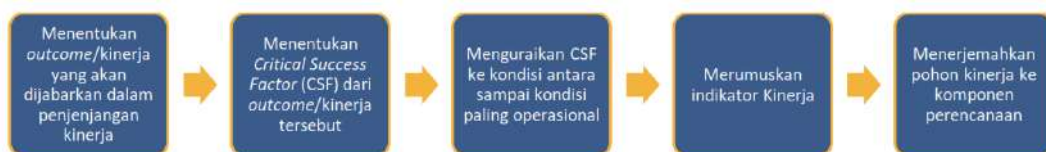


5. Sasaran Program Badan Strategi Kebijakan Hukum

Sasaran Program (SP) merupakan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian. Setiap Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Program (IKP) dan target yang terukur. Indikator Kinerja Program merupakan ukuran (kuantitatif/kualitatif), yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Program. Sasaran Program BSK Hukum merupakan hasil dari proses penjenjangan kinerja (*cascading*) dari tingkat Kementerian. *Cascading* tersebut dilakukan dengan mengacu pada pohon kinerja Kementerian serta berpedoman pada tugas dan fungsi BSK Hukum.

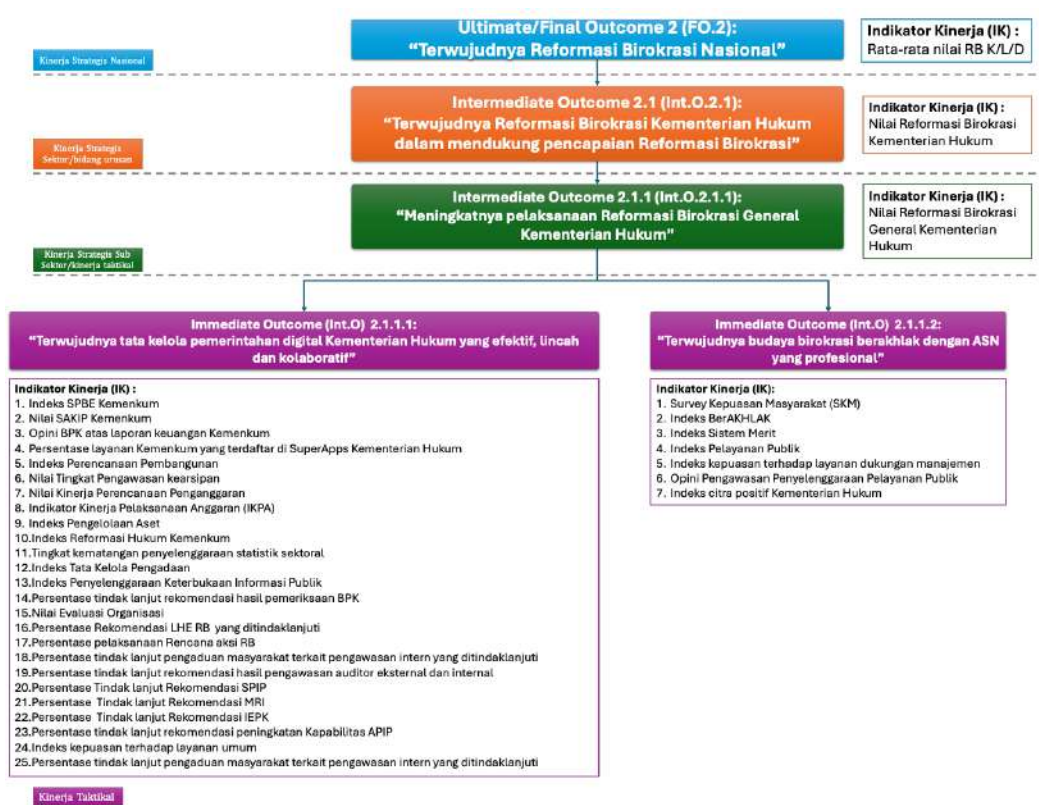
Berdasarkan PermenPAN-RB 89/ 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja di tingkat kementerian kepada unit organisasi di bawahnya sampai dengan individu pegawai. Melalui penjenjangan kinerja tersebut, sasaran strategis kementerian diturunkan (*cascading*) menjadi sasaran program UKE I, lalu diterjemahkan menjadi kegiatan dan *output* di tingkat unit pelaksana. Dengan melakukan penjenjangan kinerja, setiap unit organisasi memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam melakukan penjenjangan kinerja, yaitu:

Bagan 1 - Tahapan dalam Penjenjangan Kinerja



Tahapan 1 (satu) sampai dengan tahapan 4 (empat) merupakan tahapan untuk menyusun pohon kinerja, setelah pohon kinerja di tingkat Kementerian disusun, kemudian di tahap ke-5 dilakukan penerjemahan pohon kinerja. Berikut adalah pohon kinerja Kementerian Hukum yang telah disusun:

Gambar 8 - Pohon Kinerja Kementerian Hukum



Berdasarkan pohon kinerja Kementerian di atas, BSK Hukum berkontribusi pada Intermediate Outcome 2.1, yakni mendukung pencapaian program reformasi birokrasi Kementerian. Intermediate Outcome 2.1 tersebut kemudian diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian seperti pada tabel di bawah:

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS.2: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi nasional	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Sasaran Strategis Kementerian tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) menjadi Sasaran Program BSK Hukum menjadi: *Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum.*

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
SP 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	IKP 1.1 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan bagian dari penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, capaian dari IKK ini akan berkontribusi secara

langsung terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sendiri merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*). Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dilakukan melalui empat dimensi, yaitu Perencanaan, Implementasi, Evaluasi dan Keberlanjutan, serta Transparansi dan Partisipasi. Dengan demikian, penerjemahan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB 89/2021 berfungsi untuk memastikan setiap hasil, kegiatan, dan indikator kinerja di seluruh tingkatan organisasi memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian sasaran strategis kementerian.

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja BSK Hukum sebagai Unit Kerja Eselon I yang berperan sebagai dukungan manajemen (*supporting unit*) Kementerian Hukum dalam hal perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Gambar 9 - Perjanjian Kinerja Kepala BSK Hukum Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Supratman Andi Agtas
Jabatan : Menteri Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Menteri Hukum



Supratman Andi Agtas

Pihak Pertama,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
DENGAN MENTERI HUKUM**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65
2.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum 2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	82 3

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 97.148.968.000,-
1.	Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum	Rp. 68.396.623.000,-
2.	Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Hukum	Rp. 6.050.377.000,-
3.	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	Rp. 3.375.917.000,-
4.	Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	Rp. 3.082.927.000,-
5.	Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	Rp. 4.562.058.000,-
6.	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp. 11.681.066.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Menteri Hukum



Supratman Andi Agtas

Pihak Pertama,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

1. Indikator Kinerja Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65,00 Formulasi penghitungan: $Nilai\ IKK = \sum (Nilai\ sub\ indikator \times bobot)$
2.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, IKU BSK Hukum dibagi ke dalam 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing Unit Kerja Eselon II-nya. Pada tahun 2025, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum. Namun untuk BSK Hukum sendiri, perubahan tersebut hanya berdampak pada level Sasaran Kegiatan di Unit Kerja Eselon II. Berikut Perjanjian Kinerja sebelum perubahan dan sesudah perubahan di level Unit Kerja Eselon II di lingkungan BSK Hukum:

2. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan dan Pembinaan Hukum Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang ditindaklanjuti	95% Formulasi penghitungan: $\frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pembinaan hukum	3,1
		2. Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum	Predikat Istimewa (90-100)
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober–31 Desember 2025)			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang ditindaklanjuti	95% Formulasi penghitungan: $\frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	3,74
		2. Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum	Predikat Istimewa (90-100)

3. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum yang ditindaklanjuti	95% Formulasi penghitungan: $\frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	3,1
		2. Persentase rekomendasi hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas Kementerian Hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum	80%
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober–31 Desember 2025)			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum yang ditindaklanjuti	95% Formulasi penghitungan: $\frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	3,74
		2. Persentase rekomendasi hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas Kementerian Hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum	80%

4. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum yang ditindaklanjuti	95% Formulasi penghitungan: $\frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	3,1
		2. Indeks Layanan Kesekretariatan Kementerian Hukum	3,1
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober–31 Desember 2025)			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum yang ditindaklanjuti	95% Formulasi penghitungan: $\frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	3,74
		2. Indeks Layanan Kesekretariatan Kementerian Hukum	3,1

5. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari-22 Oktober 2025)			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum	Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum yang ditindaklanjuti	95% $\frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$
2.	Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan	82% $\frac{\sum \text{hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan tahun berjalan}}{\sum \text{hasil analisis strategi kebijakan yang dihasilkan tahun sebelumnya}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum	3,1
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65,00
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober-31 Desember 2025)			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang evaluasi dan publikasi kebijakan hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang evaluasi dan publikasi kebijakan hukum yang ditindaklanjuti	95% $\frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$
2.	Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan	82% $\frac{\sum \text{hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan tahun berjalan}}{\sum \text{hasil analisis strategi kebijakan yang dihasilkan tahun sebelumnya}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	3,74
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65,00

6. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	100% $\frac{\text{Rencana aksi RB terkait BSK yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait BSK}} \times 100\%$
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum terhadap layanan kesekretariatan	3,1
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober-31 Desember 2025)			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100% Formulasi penghitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi temuan BPK}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,74
3.	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	90

C. MANAJEMEN RISIKO

BSK Hukum sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai *supporting* unit yang menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Dalam mencapai tujuannya, setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko. Manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) unit utama, BSK Hukum bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengendalian intern dengan menerapkan Manajemen Risiko dan melakukan pengendalian internal secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Manajemen risiko BSK Hukum disusun untuk memastikan setiap sasaran program dan kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai rencana. Setiap sasaran memiliki tantangan dan potensi hambatan, sehingga pengelolaan risiko menjadi langkah penting agar kualitas kebijakan hukum tetap terjaga. Dengan memahami risiko sejak awal, BSK Hukum dapat menyiapkan langkah preventif yang tepat dan mencegah gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini juga memperkuat tata kelola organisasi yang dituntut semakin adaptif dan responsif terhadap perubahan. Risiko yang dihadapi tidak hanya berasal dari kapasitas internal, tetapi juga dari dinamika eksternal seperti perubahan regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, hingga penyesuaian prioritas nasional. Karena itu, proses pengelolaan risiko dilakukan secara terarah dan terus-menerus.

Tabel 2 - Proses Manajemen Risiko di BSK Hukum

Tahapan	Langkah	Hasil
Tahap-1 Penetapan Tujuan	Menetapkan ruang lingkup berdasarkan program, sasaran indikator pada Rencana Strategis BSK Hukum serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan capaian kinerja	Terdapat 8 potensi risiko permasalahan
Tahap-2 Identifikasi Risiko	Menetapkan 8 potensi risiko permasalahan dengan pemilik risiko dari masing-masing pusat dan bagian	Dari 8 potensi risiko ditetapkan 19 potensi penyebab risiko yang terbagi atas sumber internal dan eksternal
Tahap-3 Analisis Risiko	- Menetapkan <i>Key Risk Indikator</i> (KRI)/Indikator Risiko Utama melalui perhitungan Kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko - Menetapkan tingkat risiko dan profil risiko	Diperoleh tingkat risiko sebagai berikut: 1 risiko profil sangat tinggi (merah) 3 risiko profil tinggi (orange) 2 risiko profil sedang (kuning) 6 risiko profil rendah (biru) 7 risiko profil sangat rendah (hijau)
Tahap-4 Evaluasi Risiko	- Menetapkan prioritas risiko berdasarkan tingkat risiko dan profil risiko, - Menetapkan toleransi risiko	<i>Key Risk Indicator</i> (KRI)/Indikator Utama Risiko
Tahap-5 Rencana Aksi Penanganan Risiko	Menetapkan rencana aksi pengendalian, output, target, waktu, dan penanggung jawab	- Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr) - KCI/Indikator Pengendalian Risiko
Tahap-6 Pemantauan dan Reviu	Melakukan pemantauan atas target indikator <i>risk</i> dan kegiatan pengendalian	

Dengan mengintegrasikan setiap risiko pada sasaran program dan kegiatan membuat BSK lebih mudah memantau kemajuan, mengidentifikasi area yang berpotensi menghambat, dan menjaga keselarasan antara rencana dan implementasi. Dengan begitu, manajemen risiko tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi alat untuk memastikan kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan, berbasis bukti, dan memberikan dampak strategis.

Berikut detil dari Tahap-1 (Penetapan Tujuan) dan Tahap-2 (Identifikasi Risiko) di BSK Hukum:

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Unit Pemilik Risiko: **Badan Strategi Kebijakan Hukum**

Periode Penerapan: **2025**

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Konteks MR: Standar Kinerja					
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi tidak mencapai target yang telah ditentukan
			Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum	2	Tidak tercapainya target penilaian Indeks Reformasi Hukum
			Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum	3	Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas belum sepenuhnya meningkatkan kualitas layanan publik Kementerian Hukum
			Indeks Layanan Kesekretariatan Kementerian Hukum	4	Tidak tercapainya target pelaksanaan survei Indeks Layanan Kesekretariatan Kementerian Hukum
			Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	5	Tidak tercapainya target penilaian IKK Kementerian Hukum
		Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dimanfaatkan	6	Hasil Analisis Strategi Kebijakan belum mendukung peningkatan kualitas kebijakan Kementerian Hukum
Konteks MR : Risiko Fraud					
2	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	7	Terdapat indikasi fraud dalam pelayanan internal organisasi
		Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dimanfaatkan	8	Adanya perilaku kecurangan dalam pemberian pelayanan publik
Konteks MR : Risiko Keuangan					
3	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	9	Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan

CATATAN:

Kolom (1): Diisi dengan nomor urut; dan

Kolom (2): diisi dengan strategi/program/kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan ditetapkan.

Kolom (3): diisi dengan SS/SP/SK; dan

Kolom (4): diisi dengan IKSS/IKP/IKK.

Kolom (5): diisi dengan nomor urut potensi Risiko; dan

Kolom (6): diisi dengan potensi Risiko yang teridentifikasi berpotensi menghambat capaian SS dan IKSS/SP dan IKP/SK dan IKK. Penentuan potensi Risiko dilakukan pada Konteks MR Standar Kinerja, Risiko Fraud, dan Risiko Keuangan.

Langkah 2: Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Badan Strategi Kebijakan Hukum
Periode Penerapan: 2025

No	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Kategori Risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konteks MR: Standar Kinerja									
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi tidak mencapai target yang telah ditentukan	Risiko Operasional	Sekretaris Badan	1,1	Ketidakefektifan target Penilaian Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah ditetapkan	eksternal
					Risiko Operasional		1,2	Capaian Kinerja dan anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum tidak sesuai target yang telah ditetapkan	internal
					Risiko Kepatuhan	Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1,3	Ditemukannya perilaku wanprestasi dalam kebijakan komitmen kepatuhan	eksternal
					Risiko Operasional	Kepala Bagian Umum	1,4	Ketidakefektifan pelaksanaan belanja inventaris/barang dan jasa non POM dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor M.KH. 6/PB.02.01 Tahun 2022 terkait penggunaan produk dalam negeri	internal
					Risiko Operasional		1,5	BMN yang rusak, hilang atau disugul	internal
					Risiko Operasional		1,6	Ketidakefektifan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara	internal
		Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum	2	Tidak tercapainya target penilaian Indeks Reformasi Hukum	Risiko Operasional	Kepala Bagian SDM dan Organisasi	1,7	belum tersedianya sarana prasarana penunjang tugas pegawai BSK Hukum yang memadai	internal
					Risiko Operasional		1,8	Belum meningkatnya kompetensi SDM, terdapat IP berasal dari hasil divestigasi	internal
		Persentase rekomendasi hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum	3	Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat layanan publik, persepsi anti korupsi dan Indeks Integritas belum sepenuhnya meningkatkan kualitas layanan publik Kementerian Hukum	Risiko Kepatuhan	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	2,1	Tidak tercapainya target penilaian Indeks Reformasi Hukum	eksternal
					Risiko Reputasi		Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	3,1	Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat layanan publik, persepsi anti korupsi dan Indeks Integritas belum sepenuhnya meningkatkan kualitas layanan publik Kementerian Hukum
		Indeks Layanan Kesejahteraan Kementerian Hukum	4	Tidak tercapainya target pelaksanaan survei Indeks Layanan Kesejahteraan Kementerian Hukum	Risiko Operasional	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum		4,1	Tidak tercapainya target pelaksanaan survei Indeks Layanan Kesejahteraan Kementerian Hukum
					Risiko Kepatuhan		Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	5,1	Tidak tercapainya target penilaian IKK Kementerian Hukum
	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	5	Tidak tercapainya target penilaian IKK Kementerian Hukum	Risiko Kepatuhan	Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	5,1	Tidak tercapainya target penilaian IKK Kementerian Hukum	eksternal	
				Risiko Operasional		6,1	Usulan tema/topik belum seluruhnya dapat dilakukan analisis kebijakan	eksternal	
Terwujudnya kemandirian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dimanfaatkan	6	Hasil Analisis Strategi Kebijakan belum mendukung peningkatan kualitas kebijakan Kementerian Hukum	Risiko Operasional	Para Kepala Pusat	6,1	Usulan tema/topik belum seluruhnya dapat dilakukan analisis kebijakan	eksternal	
				Risiko Operasional		6,2	Rekomendasi hasil analisis kebijakan belum dimanfaatkan seluruhnya oleh UKEI	eksternal	
Konteks MR: Risiko Fraud									
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	7	Terdapat indikasi fraud dalam pelayanan internal organisasi	Risiko Fraud	Kepala Bagian Umum	7,1	Adanya peluang korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku	eksternal
					Risiko Fraud		Kepala Bagian SDM dan Organisasi	7,2	Adanya peluang pengalihan gratifikasi dalam proses pengurusan kenaikan jenjang jabatan fungsional, promosi jabatan dan mutasi yang tidak memenuhi syarat
	Terwujudnya kemandirian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dimanfaatkan	8	Terdapat indikasi fraud dalam pelayanan internal organisasi	Risiko Fraud	Para Kepala Pusat	8,1	Terdapat peluang gratifikasi pada pelaksanaan pengumpulan data lapangan sehingga hasil temuan/data yang diperoleh oleh Tim Analisis Strategi tidak relevan dan valid dengan data lapangan	eksternal
Konteks MR: Risiko Keuangan									
3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	9	Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan	Risiko Operasional	Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9,1	Kesalahan pencatatan Akun dalam proses pengajuan dan input pertanggung jawaban keuangan sehingga menimbulkan salah saji pada laporan keuangan	internal
					Risiko Operasional		9,2	Pelaksanaan kegiatan dan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan revisi anggaran dilakukan berulang kali	internal
					Risiko Operasional		9,3	Realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai target rencana penarikan dana yang telah ditetapkan	internal

CATATAN:
Kolom (1): Diisi dengan nomor urut;
Kolom (2): diisi dengan SS/SP/SK
Kolom (3): diisi dengan IKSS/IKP/IKK
Kolom (4): diisi dengan kode Potensi Risiko
Kolom (5): diisi dengan IKSS/IKP/IKK
Kolom (6): Potensi Risiko yang diisi
Kolom (7): Potensi Risiko yang diisi berdasarkan UPR yang telah ditentukan
Kolom (8): kode, diisi dengan kode Potensi Penyebab Risiko dengan format (Kode Potensi Risiko)/(Nomor Urut Potensi Penyebab Risiko);
Kolom (9): diisi dengan potensi penyebab Risiko berdasarkan hasil identifikasi
Kolom (10): diisi dengan Sumber Risiko, baik dari faktor eksternal dan/atau faktor internal.



Bab III

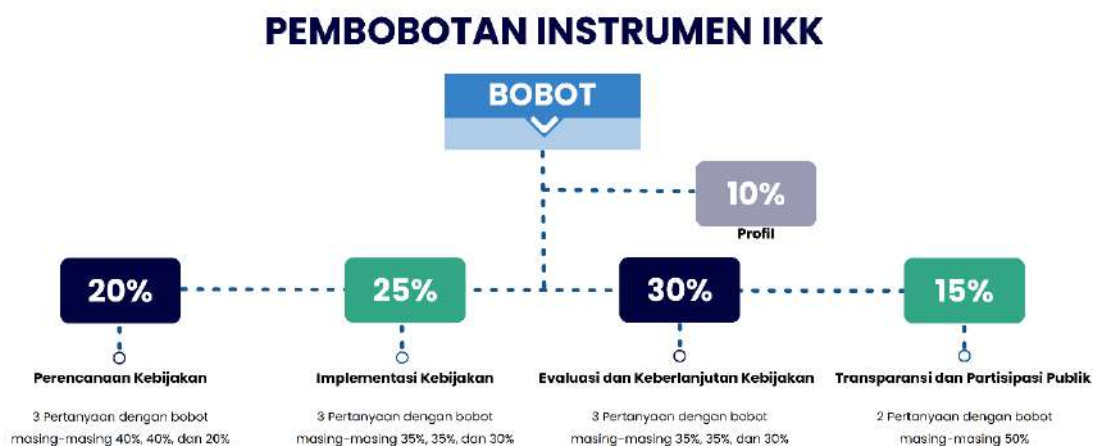
AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP BSK HUKUM 2025

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Pada tahun 2025, BSK Hukum memiliki 2 (dua) Sasaran Program, yaitu: (1): “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum,” dan (2): “Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.”

Pengukuran tingkat capaian kinerja BSK Hukum untuk Sasaran Program (1) dilakukan dengan **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)**. Penilaian IKK dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi penilai setiap 2 tahun sekali, dimana IKK Kementerian Hukum diukur pada tahun ganjil. Pada tahun 2025, terdapat perubahan instrumen pengukuran kualitas kebijakan. Pengukuran IKK mulai tahun ini akan menggunakan kerangka instrumen terbaru sebagai berikut:



Nilai akhir hasil pengukuran IKK diperoleh dengan predikat sebagai berikut:

Nilai	Kualifikasi
91,00 – 100	UNGGUL
80,00 – 90,99	SANGAT BAIK
65,00 – 79,99	BAIK
50,00 – 64,99	CUKUP
< 50,00	KURANG

Pengukuran tingkat capaian kinerja BSK Hukum untuk Sasaran Program (2) dilakukan dengan menggunakan **Indeks Reformasi Birokrasi (RB)** Kementerian Hukum yang dibina oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara garis besar, capaian kinerja BSK Hukum Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi pencapaiannya.

1. Capaian Kinerja Sasaran Program Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65,00	92,54 (kategori: UNGGUL)	142,37%
2.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82	Menunggu finalisasi nilai dari KemenPAN-RB	
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3		

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Baik (65,00 – 79,99)	Unggul (91,03)	140,04%	65,00	92,54 (kategori: UNGGUL)	142,37%
2.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	82	86,33	105,28%	82	Menunggu finalisasi nilai dari KemenPAN-RB	
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3	4,05	135%	3		

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	2025		2026	2027	2028	2029
		TARGET	REALISASI	TARGET			
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65 Indeks	92,54 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode Renstra BSK Hukum 2025–2029. Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Capaian IKK di tahun pertama Renstra periode ini telah menunjukkan hasil yang memuaskan yakni di angka 92,54 indeks (kategori: Unggul), jauh melampaui target yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Pengukuran terhadap Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Nasional dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 737/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025, telah dilakukan pengukuran IKK terhadap 82 kementerian/lembaga dan 386 pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Kementerian Hukum, melalui BSK Hukum, mendapatkan nilai IKK sebesar **92,54 (kategori: Unggul)**. Dalam skala nasional, Kementerian Hukum termasuk dalam *Top 10* nilai IKK nasional dan mendapat penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga dengan nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) berkategori **UNGGUL** dalam Acara Penganugerahan IKK Award Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh LAN.

KEGIATAN	TARGET NASIONAL	REALISASI BSK HUKUM	CAPAIAN
Indeks Kualitas Kebijakan	Baik (65,00–79,99)	92,54 (kategori: Unggul)	142,37%

e. Analisis Penyebab Kegagalan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara garis besar, semua capaian target kinerja BSK Hukum pada tahun 2025 tidak ada yang mengalami kegagalan. Namun demikian, tantangan muncul dari dinamika kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku pengampu pengukuran IKK, baik pada tahap awal maupun tahap pelaksanaan. Pada tahap awal, kendala berupa keterlambatan perilisasi *toolkit* pengukuran IKK Tahun 2025. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan, perubahan pedoman, dan tenggat waktu yang dilakukan LAN secara langsung melalui laman resmi tanpa notifikasi tertulis juga menimbulkan ketidakpastian administratif bagi Tim BSK Hukum.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Tim BSK Hukum menerapkan strategi penyesuaian jadwal secara fleksibel dan adaptif. Penyesuaian ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan UKE I (Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Kekayaan Intelektual, dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan) selaku pemrakarsa kebijakan, agar seluruh tahapan *assessment* tetap dapat dilaksanakan sesuai standar metodologis yang ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan proses pendampingan tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan ketepatan waktu maupun kualitas hasil penilaian.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari segi penganggaran, pada tahun 2025, realisasi anggaran BSK Hukum sebagai Unit Eselon I adalah sebesar **98,30%** atau sebesar Rp48,157,550,391 dari total pagu efektif Rp48,990,413,000,- (pagu awal sebelum blokir adalah sebesar Rp96.848.968.000,-). Dengan hanya menggunakan 50,6% dari dana yang direncanakan di awal tahun (karena adanya *Automatic Adjustment* atau pemblokiran anggaran), BSK Hukum dituntut untuk melakukan realokasi dan prioritas kegiatan.

Tingginya serapan pada pagu efektif (98,30%) menunjukkan bahwa manajemen BSK Hukum mampu melakukan *adjustment* (penyesuaian) yang cepat

terhadap perubahan postur anggaran, dan melihat bahwa target kinerja BSK Hukum tetap tercapai meskipun anggaran terpangkas hampir setengahnya menunjukkan tingkat efisiensi manajerial yang sangat tinggi. Keberhasilan ini merupakan hasil strategi **re-prioritizing** dan **digitalisasi proses bisnis**. BSK Hukum menyaring kegiatan, membuang kegiatan seremonial atau pendukung yang tidak berkontribusi langsung pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, beban kerja yang seharusnya dibiayai sendiri dapat terselesaikan melalui kolaborasi atau *cost-sharing*.

Dengan strategi tersebut, BSK Hukum berhasil memitigasi risiko pemangkasan anggaran dengan mengalihkan metode kerja ke arah yang lebih *lean* (ramping) tanpa mengurangi esensi dan kualitas output yang dihasilkan. Hal ini merefleksikan prinsip *spending better* di mana setiap Rupiah yang digunakan memberikan dampak maksimal bagi organisasi.

Dari segi SDM, BSK Hukum berhasil menunjukkan tingkat efisiensi SDM yang sangat optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, pelayanan hukum, tata kelola hukum, dan evaluasi strategi kebijakan hukum. Dengan keterbatasan SDM, terutama JF Analis Kebijakan, BSK Hukum mampu melakukan kegiatan analisis kebijakan sejumlah **59 judul di tahun 2025**, lebih banyak dibanding tahun 2024 (43 judul).

Keberhasilan ini merupakan hasil dari strategi optimalisasi kapabilitas internal melalui pola kerja kolaboratif lintas jabatan dan lintas UKE II (Analis Hukum, Analis SDM Aparatur, Perencana, maupun Pelaksana) yang juga dilibatkan dalam kegiatan analisis kebijakan. Pola sinergi ini membuktikan bahwa keterbatasan SDM bukan menjadi penghambat, melainkan katalisator bagi terciptanya budaya kerja yang lebih integratif dan produktif dalam penyelenggaraan strategi kebijakan hukum.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Salah satu Indikator Kerja Utama BSK Hukum telah berhasil mencapai target yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Hukum dengan nilai **92,54 (predikat Unggul)**. Dalam skala nasional, Kementerian Hukum termasuk dalam *Top 10* nilai IKK nasional dan mendapat penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga dengan nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) berkategori **UNGGUL** dalam Acara Penganugerahan IKK Award Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh LAN.

Pengukuran IKK dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggunakan metode *self assessment* dimana setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai instrumen yang telah ditentukan dan mengunggah mandiri dokumen bukti yang mendukung jawaban atas instrumen IKK. Pengukuran IKK dilakukan dalam rangka mendorong K/L/Pemda untuk secara aktif meningkatkan kualitas kebijakan di instansinya.

Berdasarkan Keputusan Delegasi dari Menteri Hukum dan HAM, BSK Hukum menjalankan tugas sebagai Pelaksana Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Hukum dan HAM. Keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dengan nilai 92,54 (predikat Unggul) tidak

terlepas dari **peran aktif** BSK Hukum dalam melakukan pendampingan untuk UKE 1. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum 2025 dilaksanakan dengan detail sebagai berikut:

Waktu	Kegiatan
Minggu ke-1 bulan Juli 2025	Sosialisasi pedoman baru pengukuran IKK 2025 ke UKE I.
Minggu ke-2 sampai minggu ke-4 bulan Juli 2025	Melakukan pendampingan pada UKE I dalam pemenuhan data dukung IKK 2025.
28-29 Juli 2025	Rapat verifikasi pengisian data dukung IKK pada sistem pengukuran IKK LAN 2025.
1 September 2025	Penutupan waktu penilaian mandiri secara nasional.
Agustus–September 2025	Berkoordinasi dengan Koordinator Nasional LAN terkait <i>feedback</i> untuk dilakukan perbaikan.
	Mendukung pelaksanaan evaluasi Permenkumham melalui pengumpulan data <i>in-depth</i> terhadap kelompok sasaran kebijakan di daerah, dalam rangka mendukung pemenuhan data dukung pada indikator Implementasi Kebijakan, Evaluasi, dan Keberlanjutan Kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik.
Oktober 2025	Berkoordinasi dengan UKE I dalam rangka perbaikan data dukung, hasil <i>feedback</i> dari Verifikator LAN.
November–Desember 2025	- Pengumuman hasil penilaian nasional pengukuran IKK 2025. - Melakukan evaluasi pelaksanaan pengukuran IKK Kementerian Hukum 2025 dan penyusunan laporan.

Ditinjau dari target capaian kinerja BSK Hukum untuk Sasaran Program (2) “Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum” dilakukan dengan menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (RB), dapat dinyatakan berhasil karena telah mencapai Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BSK Hukum yang terwujud dalam pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) sebesar **100%** pada tahun 2025. Keberhasilan ini dapat terwujud karena BSK Hukum memiliki Tim Kerja Reformasi Birokrasi/Tim Pembangunan Zona Integritas yang aktif memantau pemenuhan data dukung RKT RB pada aplikasi e-RB.

BSK Hukum juga mempunyai peran yang sangat strategis sebagai *supporting* unit dalam hal perumusan kebijakan di bidang hukum dengan melaksanakan analisis strategi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BSK Hukum dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan salah satunya berupa Peraturan Menteri Hukum (Permenkum). Berikut adalah kegiatan analisis strategi kebijakan (progsun dan isu aktual) dan kegiatan *mandatory* yang dilakukan oleh BSK Hukum selama tahun 2025.

6 KEGIATAN MANDATORY



- Pengukuran Indeks Reformasi Hukum (IRH)
- Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
- Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK)
- Uji Kelayakan Inovasi Penghargaan Karyadhika Madya Tahun 2025
- Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM
- Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Hukum Tahun 2025



ANALISIS KEBIJAKAN

94 Topik Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan Per Pusat

18 Judul Analisis Kebijakan

Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

30 Judul Analisis Kebijakan

Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

33 Judul Analisis Kebijakan

Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

8 Judul Analisis Kebijakan

Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan dan Pembinaan Hukum

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)					
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum	3,1	3,75 (Sangat Baik)	120,97%
		2. Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum	Predikat Istimewa (90-100)	100%	100%
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober-31 Desember 2025)					
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	3,74	3,75 (Sangat Baik)	100,26%
		2. Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum	Predikat Istimewa (90-100)	100	100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)							
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan	1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	95%	100%
							105,26%

	hak asasi manusia	2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasi kan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 artikel	1 artikel	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1	3,49	112,6%	3,1	3,75 (Sangat Baik)	120,97%
		2. Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Predikat Istimewa (90-100)	100	111,2%	Predikat Istimewa (90-100)	100	100%
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober-31 Desember 2025)								
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	95%	100%	105,26%
		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasi kan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 artikel	1 artikel	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan	3,1	3,49	112,6%	3,74	3,75 (Sangat Baik)	100,26%

		Pembinaan Hukum						
		2. Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum	Predikat Istimewa (90-100)	100	111,2%	Predikat Istimewa (90-100)	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2025		2026	2027	2028	2029
		TARGET	REALISASI	TARGET			
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	95,5%	96%	96,5%	97%

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode Renstra BSK Hukum 2025-2029. Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Realisasi kinerja dari Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum di tahun pertama Renstra periode ini menunjukkan hasil yang melebihi target, yakni sebesar 100% rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum telah ditindaklanjuti.

3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)					
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	3,1	3,75 (Sangat Baik)	120,97%
		2. Persentase rekomendasi hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas Kementerian Hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum	80%	100%	125%
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober–31 Desember 2025)					
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%

	kebijakan di bidang pelayanan hukum				
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	3,74	3,75 (Sangat Baik)	100,26%
		2. Persentase rekomendasi hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas Kementerian Hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum	80%	100%	100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari-22 Oktober 2025)								
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	95%	100%	105,26%
		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasi kan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 artikel	1 artikel	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1	3,49	115,16%	3,1	3,75 (Sangat Baik)	120,97%
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kategori Baik (65,00-79,99)	Unggul (91,03)	140,04%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum di tahun 2025.		
		3. Persentase rekomendasi hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum di tahun 2024.			80%	100%	125%

		korupsi dan indeks integritas Kementerian Hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum						
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober-31 Desember 2025)								
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	95%	100%	105,26%
		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasi kan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 artikel	1 artikel	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen ningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	3,1	3,49	115,16%	3,74	3,75 (Sangat Baik)	100,26%
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kategori Baik (65,00-79,99)	Unggul (91,03)	140,04%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum di tahun 2025.		
		3. Persentase rekomendasi hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas Kementerian Hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum di tahun 2024.			80%	100%	125%

		Kementerian Hukum				
--	--	-------------------	--	--	--	--

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2025		2026	2027	2028	2029
		TARGET	REALISASI	TARGET			
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	95,5%	96%	96,5%	97%

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode Renstra BSK Hukum 2025-2029. Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Realisasi kinerja dari Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum di tahun pertama Renstra periode ini menunjukkan hasil yang melebihi target, yakni sebesar 100% rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum telah ditindaklanjuti.

4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)					
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Tata Kelola Hukum	3,1	3,75 (Sangat Baik)	120,97%
		2. Indeks Layanan Kesekretariatan Kementerian Hukum	3,1	3,81 (Sangat Baik)	122,9%
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober–31 Desember 2025)					
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Strategi Tata Kelola Hukum	3,74	3,75 (Sangat Baik)	100,26%
		2. Indeks Layanan Kesekretariatan Kementerian Hukum	3,1	3,81 (Sangat Baik)	122,9%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)								
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80%	88,33%	110,42%	95%	100%	105,26%
		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasi kan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	1 artikel	1 artikel	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM	3,1	3,49	112,6%	3,1	3,75 (Sangat Baik)	120,97%
		2. Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM	80%	100%	125%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum di tahun 2025.		
		3. Indeks Layanan Kesekretariatan Kementerian Hukum	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum di tahun 2024.			3,1	3,81 (Sangat Baik)	122,9%
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober-31 Desember 2025)								
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum	1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum manusia yang ditindaklanjuti	80%	88,33%	110,42%	95%	100%	105,26%
		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasi kan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan	1 artikel	1 artikel	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari-22 Oktober 2025)								
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Strategi Kebijakan Hukum dan HAM						
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	3,1	3,49	112,6%	3,74	3,75 (Sangat Baik)	100,26%
		2. Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM	80%	100%	125%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum di tahun 2025.		
		3. Indeks Layanan Kesekretariatan Kementerian Hukum	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum di tahun 2024.			3,1	3,81 (Sangat Baik)	122,9%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2025		2026	2027	2028	2029
		TARGET	REALISASI	TARGET			
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	95,5%	96%	96,5%	97%

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode Renstra BSK Hukum 2025-2029. Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Realisasi kinerja dari Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum di tahun pertama Renstra periode ini menunjukkan hasil yang melebihi target, yakni sebesar 100% rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum telah ditindaklanjuti.

5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)					
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum	Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
2.	Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan	82%	89,13%	108,54%
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	3,1	3,75 (Sangat Baik)	120,97%
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65,00	92,54 (kategori: UNGGUL)	142,37%
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober-31 Desember 2025)					
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
2.	Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan	82%	89,13%	108,54%
3.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	3,74	3,75 (Sangat Baik)	100,26%
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65,00	92,54 (kategori: UNGGUL)	142,37%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)							
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025	
			TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	CAPAAN
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	95%	105,26%

		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 artikel	1 artikel	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
		3. Jumlah pemanfaatan data SIPKUMHAM untuk identifikasi isu kebijakan di wilayah	33 laporan identifikasi isu kebijakan	38 laporan identifikasi isu kebijakan	115,15%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
2.	Terpublikasinya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi	1. Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan	81%	84,44%	104,25%	82%	89,13%	108,54%
		2. Jumlah jurnal yang diusulkan dalam indeksasi internasional bereputasi	1 Jurnal	1 Jurnal	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
3.	Meningkatnya layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penggerak layanan (<i>enabler</i>) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tingkat ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (<i>availability time</i>)	98%	99,68%	101,71%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
4.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1	3,49	112,6%	3,1	3,75 (Sangat Baik)	120,97%
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum di tahun 2024			65,00	92,54 (kategori: UNGGUL)	142,37%
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober-31 Desember 2025)								
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang evaluasi dan publikasi kebijakan hukum	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang evaluasi dan publikasi kebijakan hukum yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	95%	100%	105,26%
		2. Jumlah hasil analisis strategi kebijakan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada media jurnal Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 artikel	1 artikel	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
		3. Jumlah pemanfaatan data SIPKUMHAM untuk identifikasi isu kebijakan di wilayah	33 laporan identifikasi isu kebijakan	38 laporan identifikasi isu kebijakan	115,15%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		

2.	Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi	1. Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan	81%	84,44%	104,25%	82%	89,13%	108,54%
		2. Jumlah jurnal yang diusulkan dalam indeksasi internasional bereputasi	1 Jurnal	1 Jurnal	100%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
3.	Meningkatnya layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penggerak layanan (<i>enabler</i>) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tingkat ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (<i>availability time</i>)	98%	99,68%	101,71%	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025		
4.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen di lingkup Pusat Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	3,1	3,49	112,6%	3,74	3,75 (Sangat Baik)	100,26%
		2. Indeks Kualitas Kementerian Hukum	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum di tahun 2024			65,00	92,54 (kategori: UNGGUL)	142,37%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2025		2026	2027	2028	2029
		TARGET	REALISASI	TARGET			
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti	95%	100%	95,5%	96%	96,5%	97%

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode Renstra BSK Hukum 2025-2029. Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Realisasi kinerja dari usat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum di tahun pertama Renstra periode ini menunjukkan hasil yang melebihi target, yakni sebesar 100% rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum telah ditindaklanjuti.

6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)					
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,75 (Sangat Baik)	120,97%

PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober-31 Desember 2025)					
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,74	3,75	100,26%
3.	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	90	93,08	103,42%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN (Periode 1 Januari–22 Oktober 2025)								
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,49	112,6%	3,1	3,75 (Sangat Baik)	120,97%
PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN (Periode 23 Oktober-31 Desember 2025)								
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025			100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,1	3,49	112,6%	3,74	3,75	100,26%
3.	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Tidak menjadi Indikator Kinerja Kegiatan di tahun 2025			90	93,08	103,42%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2025		2026	2027	2028	2029
		TARGET	REALISASI	TARGET			
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,74 Indeks	3,75	3,75 Indeks	3,76 Indeks	3,77 Indeks	3,78 Indeks
Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	90	93,08	90,5	91	91,5	92

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025, realisasi anggaran BSK Hukum sebagai Unit Eselon I adalah sebesar 98,30% atau sebesar Rp48,157,550,391 (empat puluh delapan milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari total pagu sebesar Rp96.848.968.000,- dengan rincian berikut:

Tabel 3 – Pagu dan Realisasi Anggaran BSK Hukum Tahun 2025

(UNIT/SATKER)	PAGU AWAL (Rp)	PAGU BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI DARI PAGU EFEKTIF (Rp)	DALAM PERSENTASE
BSK Hukum sebagai Unit Eselon I	96.848.968.000,-	47.858.555.000,-	48.990.413.000,-	48.157.550.391	98.30%
BSK Hukum sebagai Satker	85.167.902.000,-	39.579.551.000,-	45.588.351.000,-	44.778.335.493,-	98,22%
Kantor Wilayah	11.681.066.000,-	8.279.004.000	3.402.062.000	3.379.214.898	99,33%

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Tabel 4 - Realisasi Anggaran Per Kegiatan pada BSK Hukum Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO KOMPONEN/SUBKOMP/DETIL	PAGU AWAL	PAGU BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	85.167.902.000,-	39.579.551.000,-	45.588.351.000,-	44.778.335.493,-	98,22%
7138	Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum	68.096.623.000,-	28.632.717.000,-	39.463.906.000,-	38.826.766.223,-	98,39%
7139	Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	6.050.377.000,-	3.135.511.000,-	2.914.866.000,-	2.769.978.144,-	95,03%

7140	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	3.375.917.000,-	2.166.338.000,-	1.209.579.000,-	1.206.707.303,-	99,76%
7141	Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	3.082.927.000,-	2.082.927.000,-	1.000.000.000,-	996.277.410,-	99,63%
7142	Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	4.562.058.000,-	3.562.058.000,-	1.000.000.000,-	978.606.413,-	97,86%

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Dibandingkan dengan tahun 2024, pagu anggaran BSK Hukum di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 178%, dari semula Rp54.478.336.000,- menjadi Rp96.848.968.000,-. Namun dalam pelaksanaan anggarannya, pagu yang dapat digunakan adalah pagu efektif setelah blokir, yakni sebesar Rp48,990,413,000,-.

Berikut perbandingan anggaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya:

(UNIT/SATKER)	PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	
	2024	2025	2024	2025
Balitbang Hukum dan HAM Eselon I	54.478.336.000,-	48,990,413,000,-	53.476.519.967,- (98,16%)	48,157,550,391,- (98,30%)
Balitbang Hukum dan HAM Satker	45.002.556.000,-	45.588.351.000,-	44.047.502.142,- (97,88%)	44.778.335.493,- (98,22%)
Kantor Wilayah	9.475.780.000,-	3,402,062,000,-	9.442.900.881,- (99,65%)	3,379,214,898,- (99,33%)

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2025

1. Nilai Kinerja pada Monev Kementerian Keuangan

Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output dan memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi anggaran. Aplikasi SMART dapat diakses melalui browser dengan laman <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Dengan ditetapkannya KMK Nomor 466 Tahun 2023 Tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan anggaran sebagai turunan dari PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan maka terdapat perubahan pada Nilai Kinerja Anggaran pada aplikasi.

Nilai Kinerja Anggaran dibagi 2 (dua) yaitu: (1) **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran** yang meliputi: Capaian Rincian Output (75%), SBK (10%) dan Efisiensi SBK

(15%); dan **Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran** yang meliputi: Revisi DIPA, penyelesaian tagihan, Deviasi Hal 3 DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Penyerapan Anggaran, Dispensasi SPM, Belanja Kontraktual dan Capaian Output. Realisasi capaian kinerja BSK Hukum tahun 2025 untuk **Nilai Kinerja Anggaran sebesar 76,76** dengan *capture dashboard* aplikasi sebagaimana terlampir.

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Unit

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Carli:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	13512	BADAN STRATEGI KEBUJARAN HUKUM	61,33	92,19	76,76

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/>

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Berikut nilai IKPA BSK Hukum untuk tahun 2025:

Tabel 5 - Nilai IKPA BSK Hukum sebagai Unit Eselon I

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	13512	BADAN STRATEGI KEBUJARAN HUKUM	Nilai	100.00	86.16	88.03	100.00	100.00	97.48	100.00		95.28	100%	0.00	95.28
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
			Nilai Akhir	10.00	12.92	17.61	10.00	10.00	9.75	25.00					
			Nilai Aspek	93.08		96.38				100.00					

Tabel 6 - Nilai IKPA BSK Hukum sebagai Satker

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	139	135	693152	BADAN STRATEGI KEBUJARAN HUKUM	Nilai	100.00	84.63	86.17	100.00	100.00	100.00	100.00		94.93	100%	0.00	94.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.69	17.23	10.00	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	92.32		96.54				100.00					

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

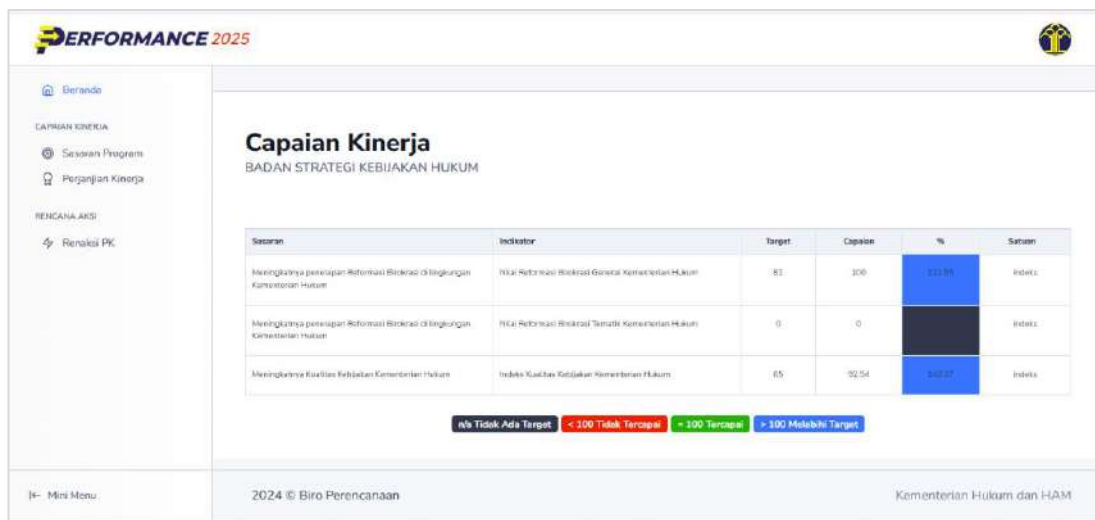
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2025

1. e-Performance Kementerian Hukum

Aplikasi Performance Kementerian Hukum <https://performance.kemenkumham.go.id/> ialah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum RI. Setiap bulan dilakukan penginputan realisasi kinerja dan anggaran sesuai dengan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, diharapkan sistem ini dapat menyajikan informasi progress capaian kinerja secara berkala sehingga dapat dijadikan dasar pelaksanaan evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan oleh pimpinan dan stakeholder terkait.

Capaian kinerja melalui aplikasi e-Performance pada unit BSK Hukum telah terisi lengkap untuk tahun 2025.

Gambar 10 – Capaian Kinerja pada e-Performance



Sumber: <http://e-performance.kemenkumham.go.id/>

2. Rencana Aksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, berikut rincian target kinerja/rencana aksi percepatan Perjanjian Kinerja pada BSK Hukum:

a) Penghitungan Indeks Reformasi Hukum

BSK Hukum telah melaksanakan pendampingan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Di samping itu, BSK Hukum secara internal telah melakukan penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum Tahun 2025.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Tahun 2025 telah diselesaikan dan dicapai partisipasi instansi sebanyak 599 yang terdiri dari 80 K/L dan 519 Pemda. K/L telah berpartisipasi 100% sedangkan dari total 546 pemerintah daerah, sekitar 519 pemerintah daerah berpartisipasi. Untuk peningkatan partisipasi instansi menjadi 100% di Pemda maka perlu adanya kebijakan dalam bentuk regulasi (Kesepakatan antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Dalam Negeri) agar Pemerintah Daerah terikat untuk berpartisipasi dalam kepesertaan

Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2025, penanggung jawab kegiatan rencana aksi tahun telah memenuhi hasil pemenuhan data dukung sebagai berikut:

[illegible]

Gambar 12 - Capaian Kinerja pada aplikasi e-Monev Bappenas Level Rincian Output

Unit Kerja

#	Kode & Nomenklatur	Pelaksanaan (% Cumulative)	Anggaran		%	Ketangkepkan											
			Alokasi	Realisasi		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
[isi 2]																	
135.12.01	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum	100.0%	58,096,623,000	38,831,041,711	57.0												
[isi 2]																	
135.12.02	Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	70.0%	6,050,377,000	2,769,978,144	45.8												
[isi 2]																	
135.12.03	Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	100.0%	3,375,917,000	1,208,984,298	35.8												
[isi 2]																	
135.12.04	Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	100.0%	3,082,927,000	996,277,410	32.3												
[isi 2]																	
135.12.05	Pusat Strategi (Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	100.0%	4,562,058,000	978,606,413	21.5												
[isi 2]																	
135.12.07	Kantor Wilayah	100.0%	11,681,066,000	3,366,482,795	29.0												

4. Penerbitan Jurnal BSK Hukum

BSK Hukum mengelola tiga jurnal ilmiah sebagai media publikasi hasil-hasil analisis kebijakan (dari internal) maupun penelitian (pihak eksternal) yang dibuat dalam karya tulis ilmiah (KTI). Ketiga jurnal dimaksud adalah: (1) Jurnal Penelitian Hukum De Jure; (2) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH); dan (3) Jurnal HAM. Ketiga jurnal tersebut telah dan mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Pengelolaan ketiga jurnal ilmiah dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi Open Journal System (OJS) versi 2 melalui laman ejournal.balitbangham.go.id. Sejak dikelola secara *online* pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, sudah terdapat lebih dari 700 KTI dengan tema hukum dan HAM yang telah dipublikasikan. Pada November 2025 dilakukan upgrade sistem OJS versi 2 ke versi terbaru untuk meningkatkan keamanan dan fitur pengelolaan jurnal. *Upgrade* ini dilakukan bersamaan dengan migrasi laman jurnal untuk menyesuaikan perkembangan organisasi. Saat ini laman website jurnal adalah <https://lawpolicyjournal.id/>.

Penerbitan jurnal di tahun 2025 terdiri dari 9 edisi yang berasal dari tiga edisi untuk setiap jurnal. Rincian jumlah tulisan yang telah dipublikasikan pada ketiga jurnal adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Tulisan pada Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah sebanyak 21 tulisan dengan rincian per edisi sebagai berikut:

Edisi	Jumlah Tulisan	Tanggal Publikasi
Maret	5	Published <i>online</i> tanggal 10 Februari 2025
Juli	5	Published <i>online</i> tanggal 16 Juni 2025
November	11	Published <i>online</i> tanggal 27 Agustus 2025

Sumber: Diolah dari open journal system Jurnal Penelitian Hukum De Jure

- b. Jumlah Tulisan pada Penerbitan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum adalah sebanyak 18 tulisan dengan rincian per edisi sebagai berikut:

Edisi	Jumlah Tulisan	Tanggal Publikasi
Maret	5	Published <i>online</i> tanggal 29 Maret 2025

Juli	5	Published online tanggal 31 Juli 2025
November	8	Published online tanggal 30 November 2025

Sumber: Diolah dari open journal system Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

- c. Jumlah Tulisan Penerbitan Jurnal HAM adalah sebanyak 15 tulisan dengan rincian per edisi sebagai berikut:

Edisi	Jumlah Tulisan	Tanggal Publikasi
April	5	Published online tanggal 30 April 2025
Agustus	5	Published online tanggal 31 Agustus 2025
Desember	5	Published online tanggal 31 Desember 2025

Sumber: Diolah dari open journal system Jurnal HAM

Dengan demikian maka sepanjang tahun 2025 telah dipublikasikan sebanyak 54 tulisan pada jurnal yang dikelola oleh BSK Hukum. Data dan informasi pengelolaan jurnal ini terdapat dalam lampiran yaitu Laporan Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Laporan Penerbitan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum dan Laporan Penerbitan Jurnal HAM

5. Penulisan Buku Tema Kementerian Hukum

Kegiatan Penulisan Buku Tema Kementerian Hukum dikhususkan untuk pegawai di lingkungan Kementerian Hukum baik itu di tingkat pusat maupun kantor wilayah. Para penulis yang berhasil menghasilkan karya buku dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama	Unit Kerja	Judul Buku
1.	Yulita Dwi Pratiwi, Ratna Kurnia Sari	Balai Harta Peninggalan Surabaya	Dekonstruksi Peran Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas dalam Perlindungan Hak Keperdataan
2.	Eka N.A.M. Sihombing	Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum Republik Indonesia	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
3.	Siska Giofana Mapusa	Kantor Wilayah Maluku Kementerian Hukum Republik Indonesia	Refleksi Reformasi Hukum: Menyoal Efektivitas Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Daerah
4.	Edison Manik, Zulhairi, Bobby Briando, Miftah Farid	Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum Republik Indonesia	Diskursus Akta Notaris dalam Bentuk Digital
5.	Dhani Ershiano	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia	Makalah Kebijakan Strategi Penerapan <i>Annual Fee</i> dan <i>Annual Return</i> bagi Perseroan Terbatas: Upaya Peningkatan PNPB dan Validitas Data Perseroan Terbatas di Indonesia
6.	Olivia Dwi Ayu Qurbanningrum	Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta Kementerian Hukum Republik Indonesia	Peran Penyuluh Hukum dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia
7.	Arfan Taufik, S.Sos.	Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta Kementerian Hukum Republik Indonesia	Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital: Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Menyeimbangkan Hak Pencipta dan Kepentingan Publik

Sumber: Data penulisan buku tema Kementerian Hukum Tahun 2025

Berdasarkan data di atas maka beberapa tema buku dari para penulis merupakan substansi yang menjadi pelaksanaan tugas dari para penulis tersebut. Di tahun 2025 ini telah terdokumentasikan pengalaman para penulis di bidang-bidang tertentu seperti pelaksanaan peran pengampuan (Balai Harta Peninggalan), pembentukan Perda, analisis evaluasi PUU di daerah, kenotariatan, perseroan terbatas, penyuluhan hukum dan kekayaan intelektual. Buku-buku tema Kementerian Hukum tahun 2025 telah dipublikasikan pada website <https://bsk.kemenkum.go.id> yaitu pada menu aplikasi <https://ebook-bsk.kemenkum.go.id/id>. Laporan kegiatan ini terdapat dalam lampiran (Laporan Penerbitan Buku).

E. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko pada BSK Hukum telah disusun sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor: PPH-26.LT.03.01 Tahun 2025 Tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor: PPH-10.OT.03.02 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko Pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Tahun 2025 yang memuat Piagam Manajemen Risiko, Susunan Pejabat sebagai Unit Pemilik Risiko Unit Utama (UPR), dan Tim Penyusun/Pembahas Manajemen Risiko.
2. Manajemen Risiko BSK Hukum disusun berdasarkan program, sasaran indikator pada Renstra BSK Hukum serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan capaian kinerja.
3. Identifikasi Risiko Strategis disusun berdasarkan permasalahan dalam mencapai Indikator Utama dan risiko lainnya disusun berdasarkan permasalahan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sebagai risiko operasional meliputi konteks standar kinerja, risiko *fraud*, dan risiko keuangan.
4. Melaksanakan pengendalian risiko mulai dari penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2025 hingga internalisasi pemahaman risiko berupa sosialisasi peraturan terbaru tentang pelaksanaan SPIP dan penerapan Manajemen Risiko. Selain itu dilakukan pemantauan atas pengendalian intern antara lain melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkala.

Hasil pemantauan dan reviu atas penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 7 - Hasil Pemantauan dan Reviu atas Risiko Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2,1	Tidak tercapainya target penilaian Indeks Reformasi Hukum	25	Presentase partisipasi K/L dan Pemda yang sudah mengetahui/ memahami pemenuhan data dukung penilaian IRH	100%	0%	-100%	Crr.2.1	1. Penyusunan SK Tim Penilai Nasional dan Tim Sekretariat IRH 2. Penyusunan Pedoman Penilaian IRH 3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan data dukung IRH 4. Melakukan penilaian nasional atas pemenuhan daduk IRH K/L/Pemda	Persentase peningkatan partisipasi dan nilai K/L dan Pemda dalam pelaksanaan penilaian IRH	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan-Undangan dan Pembinaan Hukum	1	1	100%	Telah dilakukan penilaian IRH dengan hasil penetapan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor: M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH pada K/L dan Pemda Tahun 2025 dengan partisipasi instansi sebanyak 599 yang terdiri dari 80 K/L dan 519 Pemda.
5,1	Tidak tercapainya target penilaian IKK Kementerian Hukum	19	Presentase UKE I selaku populasi sudah mengikuti tahapan IKK dalam penyusunan peraturan/ kebijakan	50%	0%	-50%	Crr.5.1	1. Menyusun SK Tim Pendamping IKK 2. Melakukan Sosialisasi Pelaksanaan IKK 3. Melakukan pemetaan populasi kebijakan yang akan menjadi objek dan pendampingan	Persentase peningkatan perolehan nilai IKK Kemenkum	Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	1	1	100%	Hasil Penilaian IKK Nasional oleh LAN bahwa Kementerian Hukum Tahun 2025 memperoleh nilai 92,54.

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								pemenuhan data dukung IKK UKE I 4. Melakukan penilaian UKK Kemenkum						
4,1	Tidak tercapainya target pelaksanaan survei Indeks Layanan Kesekretariat an Kementerian Hukum	19	Presentase responden sudah memahami pelaksanaan survei ILK	80%	0%	-80%	Crr.4.1	1. Menyusun SK Tim Pelaksana Pengukuran ILK 2. Melakukan Pemetaan jenis layanan yang akan disurvei 3. Melakukan sosialisasi pemberian pemahaman terkait mekanisme survei	Persentase peningkatan partisipasi dan nilai hasil pengukuran ILK	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	1	1	100%	Telah dilakukan Pelaksanaan survei ILK kepada seluruh satker Kementerian Hukum (per semester) dengan perolehan nilai ILK Biro/Pusdatin 3,81 dan ILK Satker sebesar 3,85.
3,1	Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas belum sepenuhnya meningkatkan kualitas layanan publik Kementerian Hukum	18	Presentase masyarakat sudah mengisi survei sesuai hasil layanan yang diterima dari Kemenkum	50%	0	-50%	Crr.3.1	1. Penyusunan Tim Pelaksana Pengukuran SPKP- SPAK 2. Melakukan Pemetaan jenis layanan yang akan disurvei dan update survei lebih user friendly 3. Melakukan Verifikasi Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Persentase peningkatan partisipasi dan nilai hasil pengukuran SPAK-SPKP	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	1	1	100%	Telah dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) secara berkala untuk mengukur Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kementerian Hukum.
6,1	Usulan tema/topik belum seluruhnya dapat dilakukan	15	Persentasi tema/ topik yang dilakukan analisis kebijakan	80%	0%	-80%	RM.5.1	1. Melakukan audiensi awal dengan pemrakarsa terkait usulan topik analisis kebijakan 2. Adanya	Persentase pelaksanaan analisis kebijakan sesuai permintaan	Para Kepala Pusat	1	1	100%	1. Telah dilakukan koordinasi dan audiensi awal UKE I selaku pemrakarsa untuk menentukan urgensi 2. Melakukan kajian

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	analisis kebijakan							permintaan dari UKE I untu drop out usulan analisis kebijakan 3. Adanya keterbatasan SDM dan waktu penyelesaian						cepat atas permintaan UKE I untuk isu aktual/ usulan IP permekum
1,7	belum tersedianya sarana prasarana penunjang tuisi pegawai BSK Hukum yang memadai	15	persentase fasilitas sarpras sebanding dengan kebutuhan	80%	20%	-60%	RM.1.7	1. Melakukan usulan RKBMN sesuai kebutuhan 2. Memfasilitasi kebutuhan pegawai	Persentase fasilitas sarpras penunjang tuisi sesuai kebutuhan	Kepala Bagian Umum	1		0%	Gedung Baru BSK Hukum di Cinere masih proses Renovasi. Sampai saat ini proses renovasi sudah mencapai 70% dan rencananya Triwulan I sudah bisa digunakan.
9,2	Pelaksanaan kegiatan dan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan revisi anggaran dilakukan berulang kali	15	jumlah revisi anggaran yang terjadi karena tidak sesuai perencanaan	12	9	-3	RM.9.2	1. Mengalokasikan anggaran dengan perencanaan yang akurat (RPD) 2. Koordinasi dengan PPK kegiatan	Jumlah kegiatan perencanaan RKA K/L hasil koordinasi kebutuhan unit kerja	Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1		0%	Telah dilakukan revisi DIPA guna memaksimalkan penyerapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tuisi.
6,2	Rekomendasi hasil analisis kebijakan belum dimanfaatkan seluruhnya oleh UKE I	14	persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan dimanfaatkan/ sesuai kebutuhan	90%	0%	-90%	RM.6.2	1. Melakukan audiensi menentukan latar belakang permasalahan dan merumuskan rekomendasi strategis sesuai kebutuhan stakeholders 2. Melakukan advokasi kebijakan dalam rangka	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan	Para Kepala Pusat	1	1	100%	Rekomendasi kebijakan telah disampaikan kepada stakeholders sebagai dasar pengusulan

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								penyampaian dan konfirmasi pemanfaatan rekomendasi kebijakan						
1.5	BMN yang rusak, hilang atau dikuasai	14	jumlah barang dinyatakan rusak/ hilang yang dikuasai pegawai	10	0	-10	RM.1.5	1. Penandatanganan BA bagi pemegang BMN 2. Monev BMN yang dikuasai pegawai secara berkala	Jumlah laporan monev pengelolaan BMN	Kepala Bagian Umum	1	1	100%	menindaklanjuti perbaikan atas klaim BMN yang rusak
9.3	Realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai target rencana penarikan dana yang telah ditetapkan	14	persentase realisasi anggaran mencapai target	95%	5%	-90%	RM.9.3	1. Merencanakan target penyerapan anggaran dengan akurat 2. Melakukan revisi untuk optimalisasi pencapaian target selanjutnya	Persentase penyerapan anggaran yang efektif	Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	1	100%	strategi percepatan penyerapan anggaran Semester II
1.8	Belum meratanya kompetensi SDM, terlebih JF berasal dari hasil penyetaraan	12	persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi JF	100%	0	-100%	RM.1.8	1. Memberitahukan usulan ukom/ diklat kepada masing-masing unit kerja 2. Memfasilitasi diklat/ sosialisasi/ internalisasi/ workshop pengembangan kompetensi SDM	persentase pegawai menerima pengembangan kompetensi SDM	Kepala Bagian SDM dan Organisasi	1	1	100%	memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi SDM
9.1	Kesalahan pencatatan Akun dalam proses pengajuan dan input pertanggung jawaban keuangan sehingga	12	jumlah maksimal laporan keuangan yang salah saji	4	0	-4	RM.9.1	1. Pengecekan secara berjenjang untuk meminimalisir adanya salah input data 2. Melakukan pencatatan akun proses pertanggungjawaba	Jumlah laporan keuangan yang tepat saji	Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	1	100%	Melakukan verifikasi berjenjang, mulai dari Staf PPK, PPK dan penandatanganan SPM sehingga meminimalisir kesalahan AKUN.

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	menimbulkan salah saji pada laporan keuangan							n keuangan dengan teliti						
7,1	Adanya peluang korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku	10	persentase potensi fraud dalam pengadaan barjas	95%	0	-95%	Prv.7.1	Melaksanakan proses pengadaan barjas sesuai prosedur yang berlaku	Persentase keberhasilan pengadaan barjas sesuai prosedur	Kepala Bagian Umum	1	1	100%	Melakukan koordinasi secara massif dalam pengadaan barjas sesuai prosedur melalui aplikasi pengadaan dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan
1,6	Kesalahan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara	7	jumlah BMN yang mengalami kesalahan pencatatan	10	0	-10	Prv.1.6	Melakukan pencatatan dan pelaporan BMN dengan tertib	Jumlah laporan pengelolaan BMN yang optimal	Kepala Bagian Umum	1	1	100%	Telah dilaksanakan Rekon BMN pada Semester I 2025
8,1	Terdapat peluang gratifikasi pada pelaksanaan pengumpulan data lapangan sehingga hasil temuan /data yang diperoleh oleh Tim Analisis Strategi tidak relevan dan valid dengan data lapangan	6	persentase fraud dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan	90%	0	-90%	Prv.8.1	Melakukan sebaran notifikasi tim yang akan melakukan pengumpulan data lapangan	Persentase temuan fraud dalam pengumpulan data lapangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	1	100%	Setiap pelaksanaan pengumpulan data lapangan di wilayah, Tim Satgas Anti Gratifikasi BSK Hukum menyebarkan notifikasi pencegahan fraud guna mengingatkan pegawai untuk menolak segala bentuk gratifikasi.

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Ketidacapaian target Penilaian Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah ditetapkan	5	Jumlah maksimal instrumen penilaian RB yang beragam sesuai leading sektor K/L	5	0	-5	Prv.1.1	Melaksanakan reformasi birokrasi sesuai rencana kerja sesuai kebijakan terbaru	Jumlah dokumen pelaksanaan RB sesuai target rencana penarikan yg telah ditetapkan	Kepala Bagian SDM dan Organisasi	1	1	100%	RKT RB telah 100% dipenuhi dan telah direviu oleh APIP (Tw I- Tw IV)
1.2	Capaian Kinerja dan anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum tidak sesuai target yang telah ditetapkan	5	Persentase target kinerja organisasi belum tepat	20%	0	-20%	Prv.1.2	Melakukan evaluasi kinerja dan anggaran untuk monitoring progres capaian	Persentase capaian kinerja dan anggaran sesuai target	Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1		0%	Dilakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara per triwulan, yang dilakukan oleh masing-masing Pusat dan Sekretariat.
1.3	Ditemukannya perilaku wanprestasi dalam kebijakan kemitraan kerjasama	3	Jumlah dokumen kemitraan kerjasama yang tidak terlaksana dengan baik	1	0	-1	Prv.1.3	Memasukkan klausul penyelesaian sengketa dalam MoU/ PKS	Jumlah dokumen kemitraan kerjasama yang taat prosedur	Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	1	100%	Telah terdapat dua PKS, yaitu BSK Hukum dengan Lembaga Administrasi Negara dan BSK Hukum dengan Setjen Mahkamah Konstitusi
7.2	Adanya peluang pungli dan	2	persentase potensi fraud dalam	0	0	0%	Prv.6.2	Memfasilitasi kepengurusan kenaikan jenjang,	Persentase pegawai menerima	Kepala Bagian SDM dan Organisasi	1	1	100%	Menindaklanjuti dan memfasilitasi atas usulan kenaikan pangkat/

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	gratifikasi dalam proses pengurusan kenaikan jenjang jabatan fungsional, promosi jabatan dan mutasi yang tidak memenuhi syarat		pengurusan kenaikan jenjang, promosi, mutasi pegawai					promosi dan mutasi pegawai yang masuk	layanan kepengurusan kenaikan jenjang, promosi dan mutasi					promosi/ ukom bagi pegawai yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
1.4	Ketidaksesuaian pelaksanaan belanja inventaris/barang dan jasa non PDN dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor M.HH-6.PB.02.01 Tahun 2022 terkait penggunaan produk dalam negeri	1	Jumlah maksimal instrumen pelaksanaan belanja inventaris/barang dan jasa PDN sering berubah menyesuaikan kebijakan baru	2	0	-2	Prv.1.4	Pelaksanaan belanja inventaris/barang dan jasa non PDN sesuai kebijakan terbaru	Jumlah dokumen pelaksanaan belanja inventaris/barang dan jasa non PDN dalam rangka pengelolaan BMN	Kepala Bagian Umum	1	1	100%	BSK Hukum melakukan inventarisir barang/jasa import yang akan dilakukan pengadaan di tahun 2025 dan mengusulkan ijin pengadaan atas barang/jasa impor.



Bab IV

PENUTUP
LKjIP BSK HUKUM 2025

A. KESIMPULAN

LKJIP BSK Hukum Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi serta sasaran kinerja. Dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik di BSK Hukum, menunjukkan semua program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan. Berikut capaian BSK Hukum pada tahun 2025:

- Sasaran Program (1) “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum” dilakukan pengukuran dengan menggunakan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum. Capaian terhadap target ini dinyatakan berhasil dengan realisasi sebesar **92,54** (kategori: **UNGGUL**).
- Sasaran Program (2) “Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum” dilakukan pengukuran dengan menggunakan nilai RB dari KemenPAN-RB yang belum diumumkan sampai pada saat penyusunan laporan ini dilaksanakan. Namun **UNTUK** Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BSK Hukum sendiri telah terwujud dalam pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) sebesar **100%** pada tahun 2025.
- Capaian realisasi anggaran BSK Hukum sebagai Unit Eselon I berdasarkan aplikasi OMSPAN adalah sebesar **98,30% atau sebesar Rp48,157,550,391** dari total pagu efektif sebesar Rp48,990,413,000,-.
- Terkait dengan kegiatan analisis kebijakan, sampai dengan semester I tahun 2025, BSK Hukum telah melaksanakan **6 kegiatan mandatori** dan **94 analisis kebijakan**. Capaian pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan BSK Hukum pada tahun 2025 sebesar 100%.
- Capaian kinerja lainnya:
 - 1) Monev Kemenkeu: Nilai Kinerja Anggaran sebesar **76,76**;
 - 2) Nilai IKPA BSK Hukum sebagai Unit Eselon I sebesar **95,28**;
 - 3) e-Performance BSK Hukum sudah terisi **lengkap** untuk 2025;
 - 4) Rencana Aksi atas Percepatan Perjanjian Kinerja BSK Hukum telah dilakukan secara **tepat waktu** sesuai target pelaporan;
 - 5) Monev Bappenas: telah *ter-input* dengan **lengkap** oleh seluruh Satker untuk tahun 2025;
 - 6) Penerbitan jurnal terdiri dari 9 edisi (tiga edisi untuk setiap jenis jurnal), dengan total **54 tulisan**;
 - 7) Penulisan dan penerbitan buku tema dengan Kementerian Hukum sebanyak **7 judul**.

B. SARAN

Untuk perbaikan di masa yang akan datang, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hal-hal berikut:

1. Penguatan pengukuran *outcome* dan dampak rekomendasi kebijakan BSK Hukum, yang menitikberatkan pada aspek kemanfaatan rekomendasi kebijakan. Untuk itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi kebijakan kepada UKE I di lingkungan Kementerian Hukum agar pemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat terukur. Dengan strategi tersebut, maka Perjanjian Kinerja pada

masing-masing Pusat di lingkungan BSK Hukum dapat terpenuhi dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Melaksanakan optimalisasi sosialisasi dan implementasi tata kelola kebijakan publik seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum dan Pedoman Teknis Analisis Kebijakan. Sosialisasi diperlukan untuk menyamakan pemahaman metodologi, meningkatkan kualitas kajian, dan mengurangi variasi mutu hasil analisis kebijakan baik di tingkat Pusat maupun wilayah.
3. Penguatan kapasitas dan distribusi SDM agar lebih proporsional dengan volume dan prioritas analisis kebijakan. Selain itu, kapasitas SDM perlu ditunjang dengan pelatihan lanjutan, *coaching clinic*, dan kolaborasi lintas Pusat dan wilayah.
4. Integrasi data dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dalam mendukung peran BSK Hukum sebagai *think tank*, melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan integrasi sistem manajemen pengetahuan yang mencakup basis data kajian, hasil evaluasi kebijakan, dan publikasi ilmiah. Pemanfaatan teknologi dan integrasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses analisis, mempercepat koordinasi lintas unit, dan mendukung analitik kebijakan berbasis bukti.
5. Penguatan perencanaan kinerja yang adaptif dalam menghadapi dinamika kebijakan dan isu aktual yang cepat berubah, perencanaan kinerja perlu lebih adaptif dengan menyediakan ruang bagi kajian strategis prioritas tanpa mengabaikan target kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan dan memanfaatkan aplikasi pendukung, seperti Monev Kementerian Keuangan, Monev Bappenas, Performance Kementerian Hukum.

C. MONITORING REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

BSK Hukum telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Untuk melihat upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang berkelanjutan, maka diperlukan evaluasi atas pelaporan kinerja sebagai berikut:

No.	Rekomendasi Perbaikan Kinerja dari Hasil Monev Capaian Kinerja Triwulan III 2025	Monitoring Rekomendasi Perbaikan Kinerja di Triwulan IV 2025
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja pada masing-masing Pusat dan Sekretariat secara berkala untuk memastikan pemenuhan Perjanjian Kinerja dari masing-masing Eselon II dapat terpenuhi dan tercapai.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian perjanjian kinerja pada masing-masing Pusat dan Sekretariat secara berkala. Telah dilakukan kegiatan <i>coaching and mentoring</i> atas capaian kinerja Triwulan III pada masing-masing Pusat/Sekretariat, dengan rincian: • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Jumat, 26 September 2025; • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum pada Selasa, 30 September 2025; • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum pada Senin, 29 September 2025;

		• Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum pada Senin, 29 September 2025; dan • Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Senin, 29 September 2025.
2.	Melakukan optimalisasi terhadap realisasi anggaran agar target rencana penarikan dana pada triwulan IV mencapai target yang telah ditetapkan, dengan berkoordinasi dengan Substansi Keuangan dan KPPN karena pada aplikasi OMSPAN belum ada <i>updating</i> terhadap pagu anggaran hasil efisiensi.	Telah dilakukan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) periode bulan Oktober (B10) dan Pembahasan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) TA 2025 pada Selasa, 21 Oktober 2025. Selanjutnya, Tim Substansi Keuangan BSK Hukum telah berkoordinasi dengan KPPN Jakarta V.
3.	Melakukan pengambilan <i>capture</i> secara berkala sebagai bukti perkembangan informasi akses pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan, Monev Bappenas, OMSPAN Kementerian Keuangan, dan E-Performance Kementerian Hukum.	Telah didokumentasikan secara berkala perkembangan informasi akses pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan, Monev Bappenas, OMSPAN Kementerian Keuangan, dan e-Performance Kementerian Hukum (dapat dilihat pada Laporan Triwulan dan Laporan Tindak Lanjut atas Capaian Kinerja Triwulan).
4.	Melakukan perbaikan data dukung renaksi B09 sebagaimana catatan dari verifikator. Dan untuk pelaporan renaksi B10-B11 untuk dipantau sehingga terinput di sistem tepat waktu.	Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi penginputan data dukung Rencana Aksi percepatan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum sebagai berikut: • Laporan identifikasi dan langkah perbaikan atas adanya potensi temuan berulang dalam pengelolaan Keuangan dan BMN telah diperbaiki sesuai catatan dari tim verifikator. • Dokumen usulan kebutuhan pengembangan kompetensi Asesor SPIP dan dokumen usulan kebutuhan pengembangan kompetensi unit pengelola risiko.
5.	Melakukan koordinasi secara berkala kepada pengelola laporan kinerja di Kanwil Kemenkum Aceh, Kanwil Kemenkum Papua Barat, dan Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum terkait penginputan data pada masing-masing aplikasi Monev Bappenas pada Triwulan III tahun 2025 (telat <i>input</i> data pada aplikasi monev Bappenas).	Telah berkoordinasi dengan pengelola laporan kinerja di Kanwil Kemenkum Aceh, Kanwil Kemenkum Papua Barat, dan Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum terkait penginputan data pada masing-masing aplikasi Monev Bappenas pada Triwulan III tahun 2025. Data monev telah di- <i>input</i> capaiannya pada aplikasi monev Bappenas secara lengkap.

Demikian LKJIP BSK Hukum Tahun 2025 ini disusun. Semoga ke depannya kinerja BSK Hukum akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.



Lampiran

PENUTUP
LKjIP BSK HUKUM 2025

Prestasi

BSK HUKUM 2025



Kementerian Hukum, meraih Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. Hasil pengukuran ini diumumkan secara resmi oleh LAN RI pada acara penganugerahan yang digelar di Surabaya (25/11).

Tahun ini, pelaksanaan IKK mencatat tingkat partisipasi yang sangat tinggi, yakni 548 instansi pemerintah atau 85% dari total 646 instansi. Dari seluruh K/L yang berpartisipasi, hanya 13 instansi terdiri dari 10 Kementerian dan 3 Lembaga yang berhasil meraih Predikat Unggul, menjadikannya kelompok dengan kinerja tata kelola kebijakan terbaik secara nasional.

Penghargaan diterima oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, yang mewakili Menteri Hukum dalam acara tersebut. Pencapaian ini sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas perumusan, pengelolaan, dan evaluasi kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.